



Kemendikdasmen



RENCANA STRATEGIS

BPMP PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2025 - 2029



Kontak Kami

BPMP Sulteng Official



BPMP Sulawesi Tengah



bpmp.sulawesitengah



bpmpsulteng.kemendikdasmen.go.id



Kata Pengantar

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. BPMP terbentuk pada bulan Maret 2022 sebagai hasil transformasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra BPMP periode 2022–2024, sekaligus menjadi instrumen penjabaran arah kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Tahun 2025–2029.

Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan dan strategi pencapaian target yang selaras dengan agenda pembangunan pendidikan nasional dan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. Renstra ini ditujukan agar menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (program/kegiatan), sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh warga BPMP dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan amanah ini, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 1 November 2025

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Muhammad Anis, S.Si, M.Si
NIP 197306202002121002

DAFTAR ISI

01

KATA PENGANTAR (i)
DAFTAR ISI (ii)
DAFTAR TABEL (iii)
DAFTAR GAMBAR (iv)

03

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi Dan Misi (87)
2.2 Tujuan Dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah (89)

05

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja (108)
4.2 Kerangka Pendanaan (109)

02

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum (3)
1.2 Potensi Dan Permasalahan (77)

04

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (94)
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah (96)
3.3 Kerangka Regulasi (99)
3.4 Kerangka Kelembagaan (100)
3.5 Reformasi Birokrasi (104)

06

BAB V PENUTUP (110)
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD	7
Tabel 1. 2 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD hingga SMA berdasarkan Kabupaten/Kota	11
Tabel 1. 3 Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD hingga SMA/SMK berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024	14
Tabel 1. 4 Kondisi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Sulawesi Tengah	18
Tabel 1. 5 Data ATS Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik.....	20
Tabel 1. 6 Data ATS Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik.....	21
Tabel 1. 7 Data ATS – Drop Out (DO) yang Aktif Kembali di Sekolah.....	23
Tabel 1. 8 Persentase Kuota per Jalur Jenjang SD berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2025/2026	30
Tabel 1. 9 Persentase Kuota per Jalur Jenjang SMP berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2025/2026	31
Tabel 1. 10 Rekap Daya Tampung Jenjang SD Berdasarkan Kabupaten/Kota	32
Tabel 1. 11 Rekap Daya Tampung Jenjang SMP dan SMA Berdasarkan Kabupaten/Kota	33
Tabel 1. 12 Sebaran Jenjang Satuan Pendidikan Penerima Program Revitalisasi Tahun 2025	37
Tabel 1. 13 Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi	39
Tabel 1. 14 Penerima bantuan peralatan interaktif flat panel (IFP) Provinsi Sulawesi Tengah	55
Tabel 1. 15 Jumlah Satuan Pendidikan yang Memenuhi Indikator	62
Tabel 1. 16 Penerimaan Dana Bos Reguler di satuan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.....	68
Tabel 1. 17 Capaian kinerja penjaminan mutu pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	69
Tabel 1. 18 Capaian kinerja penjaminan mutu pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	70
Tabel 1. 19 Program dan Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024.....	72
Tabel 1. 20 Capaian kinerja tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2021	73
Tabel 1. 21 Capaian kinerja tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024	74
Tabel 1. 22 Data jumlah dan sebaran sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah.....	79
Tabel 1. 23 Data Sebaran Jumlah Tenaga Pendidik di Provinsi Sulawesi Tengah.....	80
Tabel 1. 24 Data Jumlah Pegawai BPMP Sulawesi Tengah	82
Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.....	89
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	91
Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dan Indikasi Risiko	92
Tabel 3. 1 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	96
Tabel 3. 2 Aparatur Sipil Negara BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	104
Tabel 3. 3 (Enam) Area Perubahan.....	106
Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah...	108
Tabel 4. 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2029	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.....	3
Gambar 1. 2 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	4
Gambar 1. 3 Kondisi APK Provinsi Sulawesi Tengah Jenjang PAUD hingga SMA.....	9
Gambar 1. 4 Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah.....	25
Gambar 1. 5 Capaian Literasi Antarjenjang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025	40
Gambar 1. 6 Capaian Numerasi Antarjenjang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025.....	41
Gambar 1. 7 Hasil Capaian Iklim Keamanan	42
Gambar 1. 8 Hasil Capaian Inklusivitas	43
Gambar 1. 9 Hasil Capaian Iklim Kebhinekaan Sekolah	44
Gambar 1. 10 Hasil Capaian Skor Karakter	44
Gambar 1. 11 Hasil Capaian Kualitas Pembelajaran.....	45
Gambar 1. 12 Satuan PAUD berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran	46
Gambar 1. 13 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2024 dan 2025	47
Gambar 1. 14 Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sataun PAUD Tahun 2024 dan 2025	48
Gambar 1. 15 Kemitraan dengan Orang Tua/Wali pada Sataun PAUD Tahun 2024 dan 2025	48
Gambar 1. 16 Grafik Capaian 8 Indikator Layanan PAUD Holistik Integratif	49
Gambar 1. 17 Data SPPG dan Satuan Pendidikan Penerima Manfaat	59
Gambar 1. 18 Perbandingan Satuan Pendidikan yang menggunakan.....	60
Gambar 1. 19 Persentase Pemenuhan Indikator Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan.....	63
Gambar 1. 20 Penerimaan Dana Bos Reguler di satuan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.....	67
Gambar 1. 21 Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.....	78
Gambar 1. 22 Fasilitas Kantor BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.....	83
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Tengah	102

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dan mendukung upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025 – 2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2025 - 2029 yang berpedoman kepada teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah memuat rumusan sasaran program dan kegiatan dengan mengacu kepada kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen sebagai payung bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

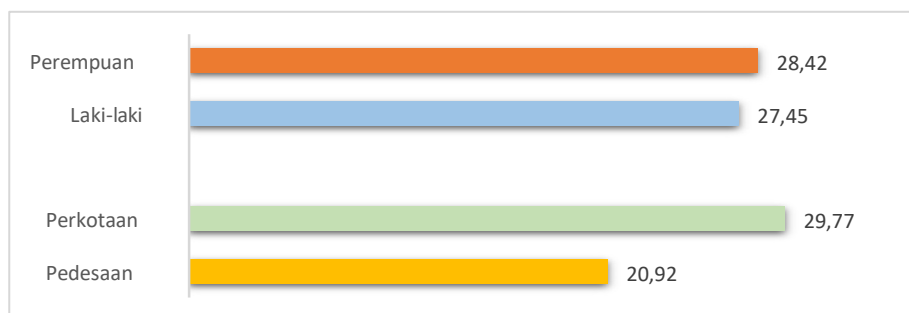
Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh - sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Partisipasi Pendidikan

1.1.1.1 Partisipasi pada PAUD

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik apabila tingkat partisipasi pendidikan penduduk pada semua jenjang semakin tinggi. Monitoring keberhasilan pendidikan melalui partisipasi sekolah dapat dilihat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Anak Tidak Sekolah.



*Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024
Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024*

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat partisipasi anak usia 3–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal.

a. Perbandingan Berdasarkan Jenis Kelamin

Angka partisipasi kasar (APK) untuk anak perempuan sebesar 28,42%, sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yang mencapai 27,45%. Perbedaan sebesar 0,97 poin persentase ini menunjukkan bahwa anak perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kecenderungan sedikit lebih besar untuk mengikuti pendidikan usia dini dibandingkan anak laki-laki. Meski selisihnya kecil, fenomena ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan partisipasi yang perlu diantisipasi agar akses pendidikan anak usia dini merata bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin.

b. Perbandingan Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

APK anak usia 3–6 tahun di wilayah perkotaan mencapai 29,77%, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya 20,92%. Selisih sebesar 8,85 poin persentase ini menegaskan adanya kesenjangan akses PAUD antara anak di kota dan anak di desa. Rendahnya partisipasi di pedesaan dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah satuan PAUD, jarak tempuh ke lembaga pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, maupun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.

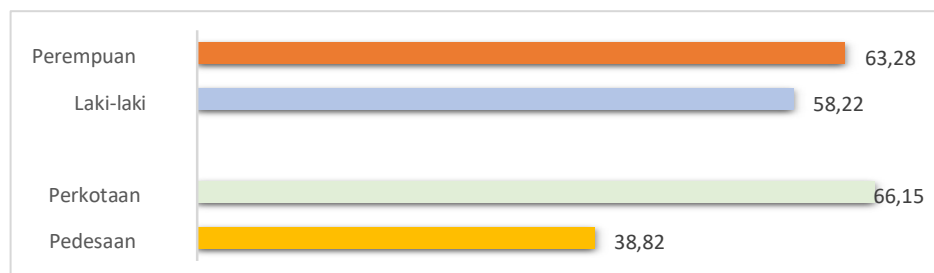
c. Interpretasi Umum

Secara keseluruhan, APK PAUD di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 masih tergolong rendah karena belum mencapai 30%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 3–6 tahun belum terlayani oleh lembaga PAUD. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan utama yang perlu ditangani melalui kebijakan pemerataan akses dan peningkatan layanan PAUD di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

d. Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu memperkuat strategi peningkatan APK melalui:

1. Perluasan dan pemerataan lembaga PAUD di daerah pedesaan
2. Program sosialisasi dan advokasi pentingnya PAUD bagi orang tua.
3. Dukungan pembiayaan dan insentif bagi penyelenggara PAUD di wilayah sulit.
4. Penguatan data dan pemantauan partisipasi anak usia dini untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.



*Gambar 1. 2 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024*

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat kesiapan anak usia dini dalam memasuki jenjang pendidikan dasar di Provinsi Sulawesi Tengah, ditinjau dari aspek jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal.

a. Perbandingan Berdasarkan Jenis Kelamin

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) anak perempuan mencapai 63,28%, lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yang sebesar 58,22%. Selisih sebesar 5,06 poin persentase ini menunjukkan bahwa anak perempuan umumnya memiliki tingkat kesiapan belajar yang lebih baik ketika akan memasuki sekolah dasar. Kesiapan ini dapat mencakup aspek kognitif, sosial-emosional, maupun kemampuan berbahasa. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan karakteristik perkembangan anak laki-laki dan perempuan atau variasi dalam pola pengasuhan di rumah dan pengalaman belajar di lembaga PAUD.

b. Perbandingan Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

AKS di wilayah perkotaan mencapai 66,15%, sedangkan di pedesaan hanya 38,82%. Kesenjangan sebesar 27,33 poin persentase ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara kesiapan anak di kota dan di desa. Anak-anak di kota cenderung lebih siap memasuki sekolah dasar karena lebih banyak terpapar lingkungan belajar yang mendukung, fasilitas PAUD yang memadai, serta peran orang tua yang lebih aktif dalam mempersiapkan pendidikan anak. Sebaliknya, rendahnya kesiapan anak di pedesaan dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap PAUD berkualitas, kurangnya tenaga pendidik terlatih, serta minimnya dukungan lingkungan belajar di rumah.

c. Interpretasi Umum

Secara keseluruhan, tingkat kesiapan sekolah anak usia dini di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong belum merata. Meskipun sebagian besar anak menunjukkan kesiapan cukup baik (di atas 60%), kesenjangan yang tajam antara anak di perkotaan dan pedesaan menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pemerataan mutu layanan PAUD. Kesiapan sekolah yang rendah di wilayah pedesaan berpotensi mempengaruhi keberhasilan belajar anak di jenjang pendidikan dasar.

d. Implikasi Kebijakan

Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan penguatan layanan PAUD berbasis pemerataan mutu, antara lain melalui:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik PAUD di pedesaan.
2. Pengembangan program transisi PAUD ke SD yang holistik dan integratif.
3. Peningkatan partisipasi orang tua dalam stimulasi perkembangan anak di rumah.
4. Penyediaan sarana belajar dan sumber belajar yang memadai di daerah sulit.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa besar kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan. APS adalah salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Berdasarkan hasil rapor Pendidikan tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan capaian yang tergolong kurang yaitu sebesar 65,02%; dimana capaian ini menurun 1,79% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 66,81%. Diperlukan pendataan yang akurat terkait anak-anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah agar dapat diperoleh jumlah sasaran yang tepat untuk pengambilan kebijakan selanjutnya, seperti penambahan biaya personel siswa atau pemberian bantuan beasiswa; peraturan daerah yang mendukung kebijakan bersekolah di PAUD sebelum masuk SD; penyediaan layanan Pendidikan melalui pembangunan Unis Sekolah Baru (USB) atau Ruang Kelas Baru (RKB).

1.1.1.2 APS Jenjang PAUD - SMA/SMK

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut. Berikut data APS jenjang PAUD hingga SMA/SMK di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Tabel 1. 1 Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD hingga SMA/SMK Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Wilayah	APS (Angka Partisipasi Sekolah)			
		PAUD	SD	SMP	SMA/SMK
1	Kab. Banggai Kepulauan	92,24	98,33	88,45	75,68
2	Kab. Buol	78,18	99,53	90,64	67,67
3	Kab. Parigi Moutong	81,27	99,12	93,87	66,14
4	Kab. Banggai Laut	75,64	97,51	90,34	63,45
5	Kab. Tojo Una-Una	81,93	97,61	93,46	75,25
6	Kab. Sigi	71,69	98,05	91,82	74,61
7	Kab. Donggala	66,85	98,68	92,81	69,89
8	Kota Palu	68,3	97,66	97,77	83,01
9	Kab. Poso	70,16	97,97	97,67	81,09
10	Kab. Morowali Utara	66,52	99,35	93,21	79,18
11	Kab. Banggai	74,49	98,05	96,26	73,32
12	Kab. Morowali	78,02	99,28	97,72	82,84
13	Kab. Tolitoli	76,7	98,61	90,79	73,79
14	Prov. Sulawesi Tengah	75,23	98,47	94,12	74,16

Sumber Data: Dashboard Wajar 13 Tahun Kemendikdasmen

Data pada tabel 1.1 menunjukkan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara umum, APS meningkat seiring dengan jenjang pendidikan dasar (SD), namun mulai menurun pada jenjang SMP dan lebih rendah lagi di jenjang SMA/SMK. Rata-rata APS Provinsi Sulawesi Tengah tercatat:

- PAUD : 75,23%
- SD : 98,47%
- SMP : 94,12%
- SMA/SMK : 74,16%

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan peserta didik dari jenjang PAUD menuju pendidikan menengah.

a. Jenjang PAUD

APS PAUD di Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif rendah (75,23%), dengan kabupaten/kota tertinggi adalah Banggai Kepulauan (92,24%), sedangkan terendah Donggala (66,85%). Rendahnya partisipasi di jenjang PAUD menunjukkan bahwa sebagian anak usia dini belum sepenuhnya terlayani pendidikan anak usia dini, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan.

b. Jenjang SD

APS SD relatif tinggi di seluruh wilayah, dengan rata-rata 93,84%. Capaian tertinggi diraih oleh Kota Palu (97,66%), diikuti Buol (99,53%), sedangkan terendah Banggai Laut (97,51%)—meskipun semua masih di atas 97%. Artinya, hampir semua anak usia SD sudah mengenyam pendidikan dasar, menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di tahap awal.

c. Jenjang SMP

APS SMP mulai menurun menjadi 91,42%. Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah Parigi Moutong (93,87%), sementara yang terendah Banggai Laut (90,34%). Penurunan APS di jenjang ini menunjukkan adanya hambatan transisi dari SD ke SMP, baik karena faktor ekonomi, jarak sekolah, maupun pernikahan usia anak di beberapa daerah.

d. Jenjang SMA/SMK

Penurunan paling tajam terlihat di jenjang SMA/SMK, dengan rata-rata 74,16%. Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah Kota Palu (83,01%), sedangkan terendah Banggai Laut (63,45%). Hal ini mengindikasikan masih banyak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke pendidikan menengah atas, yang berpotensi meningkatkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang ini.

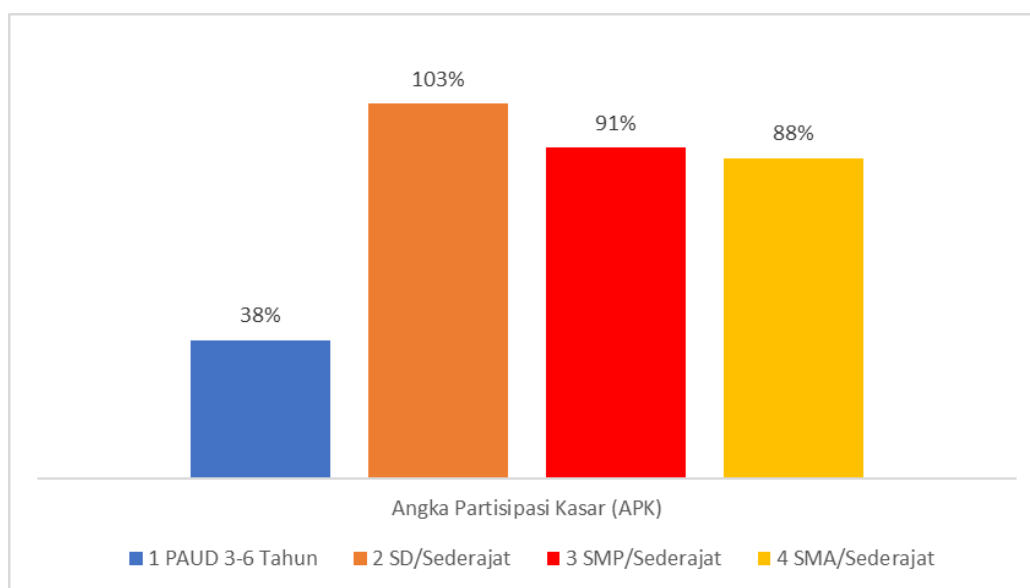
Terdapat kesenjangan cukup besar antar kabupaten/kota, terutama antara wilayah perkotaan (seperti Kota Palu dan Poso) dengan wilayah kepulauan atau terpencil (seperti Banggai Laut dan Donggala). Wilayah dengan capaian APS rendah di PAUD dan SMA/SMK cenderung memiliki korelasi dengan tingginya data ATS pada jenjang yang sama.

Implikasi dan Rekomendasi sebagai berikut:

- Perluasan akses PAUD: Meningkatkan layanan PAUD berbasis masyarakat dan pembinaan lembaga nonformal di daerah tertinggal.
- Transisi SD ke SMP: Perlu strategi pendampingan anak rentan putus sekolah melalui beasiswa, transportasi sekolah, dan penguatan peran pemerintah desa.
- Afirmasi pendidikan menengah: Diperlukan program khusus di daerah dengan APS SMA/SMK rendah agar anak-anak tidak berhenti sekolah setelah SMP.
- Pemanfaatan data: Kolaborasi lintas sektor (Disdik, BPMP, Dinas Sosial, BPS) perlu diperkuat agar data APS dan ATS dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

1.1.1.3 APK Jenjang PAUD - SMA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah seluruh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut data kondisi APS di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dashboard Wajar 13 Tahun Kemendikdasmen Tahun 2025.



Gambar 1. 3 Kondisi APK Provinsi Sulawesi Tengah Jenjang PAUD hingga SMA

Data pada gambar 1.3 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun terakhir yang tersedia, mulai dari PAUD (usia 3–6 tahun) hingga SMA/ sederajat.

a. APK PAUD (Usia 3–6 Tahun) – 38,00%

APK PAUD masih tergolong rendah, karena hanya sekitar 38% anak usia 3–6 tahun yang sudah terlayani di lembaga PAUD. Artinya, lebih dari separuh anak usia dini belum mendapatkan layanan pendidikan awal yang penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Rendahnya angka ini menunjukkan tantangan besar dalam pemerataan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

b. APK SD/Sederajat – 103,00%

APK jenjang SD yang mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa partisipasi di tingkat sekolah dasar sudah sangat baik, bahkan terdapat kelebihan angka akibat masuknya anak usia di luar kelompok umur ideal (baik yang lebih muda maupun lebih tua). Capaian ini menggambarkan akses pendidikan dasar yang relatif terbuka dan merata, serta efektivitas kebijakan wajib belajar yang sudah berjalan dengan baik di tingkat SD.

c. APK SMP/Sederajat – 91,00%

Partisipasi di jenjang SMP mengalami penurunan cukup signifikan dibanding jenjang SD. Angka 91% menunjukkan bahwa masih ada sekitar 9% anak usia SMP yang belum mengenyam pendidikan menengah pertama. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, jarak ke sekolah, atau motivasi belajar yang menurun. Kesenjangan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, juga turut mempengaruhi capaian ini.

d. APK SMA/Sederajat – 88,00%

Pada jenjang SMA, angka partisipasi kembali menurun menjadi 88%, yang berarti masih terdapat sekitar 12% remaja usia sekolah menengah atas yang belum terdaftar di lembaga pendidikan. Penurunan ini menunjukkan bahwa transisi dari SMP ke SMA masih belum optimal, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan daya tampung sekolah, faktor ekonomi keluarga, atau pilihan untuk langsung bekerja setelah tamat SMP.

e. Interpretasi Umum

Secara keseluruhan, pola APK menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin menurun tingkat partisipasi. Hal ini menjadi perhatian penting dalam mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Rendahnya APK PAUD juga berimplikasi terhadap kesiapan anak dalam menempuh pendidikan dasar dan keberhasilan belajar di jenjang berikutnya.

f. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ini, beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat antara lain:

1. Perluasan akses dan layanan PAUD berkualitas, terutama di daerah dengan APK rendah.
2. Intervensi untuk mempertahankan partisipasi di jenjang SMP dan SMA, misalnya melalui bantuan pendidikan, beasiswa, dan penyediaan sekolah terjangkau di daerah terpencil.
3. Program transisi PAUD–SD dan SMP–SMA untuk memastikan kesinambungan belajar anak.
4. Pemanfaatan data pendidikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis wilayah dan kelompok sasaran.

Tabel 1. 2 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD hingga SMA berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	APK PAUD 3-6 Tahun	APK SD/ Sederajat	APK SMP/ Sederajat	APK SMA/ Sederajat	Status Wajar
1	Kab. Banggai	41,00%	101,00%	89,00%	86,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
2	Kab. Banggai Kepulauan	57,00%	105,00%	83,00%	86,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
3	Kab. Banggai Laut	38,00%	103,00%	84,00%	77,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
4	Kab. Buol	43,00%	104,00%	88,00%	90,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
5	Kab. Donggala	29,00%	102,00%	102,00%	75,00%	Tuntas Wajar 9 tahun (SD & SMP)
6	Kab. Morowali	42,00%	107,00%	104,00%	97,00%	Tuntas Wajar 9 tahun (SD & SMP)
7	Kab. Morowali Utara	47,00%	105,00%	94,00%	96,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
8	Kab. Parigi Moutong	41,00%	103,00%	90,00%	79,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
9	Kab. Poso	38,00%	98,00%	96,00%	95,00%	Belum Tuntas Wajar
10	Kab. Sigi	33,00%	101,00%	85,00%	83,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
11	Kab. Tojo Una-Una	52,00%	105,00%	87,00%	88,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
12	Kab. Tolitoli	32,00%	108,00%	87,00%	91,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)
13	Kota Palu	22,00%	104,00%	89,00%	107,00%	Tuntas Wajar 6 tahun (SD)

Sumber Data: Dashboard Wajar 13 Tahun Kemendikdasmen

Tabel 1.2 di atas menggambarkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada empat jenjang pendidikan, yaitu PAUD (3–6 tahun), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di 13 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun terakhir, serta status ketuntasan Wajar 6 tahun atau 9 tahun.

a. APK Jenjang PAUD (3–6 Tahun)

APK PAUD di Sulawesi Tengah menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah, berkisar antara 22% hingga 57%.

- APK tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan (57%) dan Kabupaten Tojo Una-Una (52%), menunjukkan capaian yang relatif baik dalam menjangkau anak usia dini.
- APK terendah terdapat di Kota Palu (22%), Kabupaten Donggala (29%), dan Kabupaten Tolitoli (32%), menandakan masih rendahnya akses PAUD di daerah tersebut, meskipun sebagian besar memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan akses PAUD antarwilayah, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, kepadatan penduduk, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

b. APK Jenjang SD/ Sederajat

Seluruh kabupaten/kota menunjukkan APK SD di atas 100%, berkisar antara 101% hingga 106%. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar sudah sangat baik dan merata di seluruh wilayah, bahkan melampaui 100% karena masih terdapat anak usia di luar kelompok umur ideal yang ikut bersekolah. Capaian ini menandakan bahwa program wajib belajar 6 tahun telah tuntas di hampir semua daerah.

c. APK Jenjang SMP/ Sederajat

APK SMP di Provinsi Sulawesi Tengah bervariasi antara 83% hingga 104%.

- Capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara (104%), Donggala (102%), dan Morowali (100%), menandakan keberhasilan pemerataan akses pendidikan menengah pertama di daerah tersebut.

- Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan (83%), Banggai Laut (88%), dan Tojo Una-Una (87%), yang mengindikasikan masih adanya hambatan akses di daerah kepulauan dan terpencil.

Secara umum, partisipasi SMP masih cukup baik, namun beberapa wilayah perlu intervensi untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan transisi dari SD ke SMP berjalan lancar.

d. APK Jenjang SMA/Sederajat

APK SMA menunjukkan angka partisipasi antara 75% hingga 95%.

- Daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Poso (95%) dan Kota Palu (91%), menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan menengah yang memadai dan akses lebih mudah.
- Sebaliknya, capaian terendah berada di Kabupaten Donggala (75%) dan Banggai Laut (77%), menandakan masih adanya tantangan dalam kelanjutan studi ke jenjang menengah atas, terutama karena faktor ekonomi atau keterbatasan sarana.

Penurunan APK di jenjang ini memperlihatkan tantangan dalam keberlanjutan wajib belajar menuju 13 tahun.

e. Status Wajar 6 Tahun dan 9 Tahun

Dari tabel terlihat bahwa:

- Sebagian besar kabupaten/kota telah Tuntas Wajar 6 Tahun (SD).
- Beberapa daerah seperti Donggala dan Morowali sudah mencapai Tuntas Wajar 9 Tahun (SD & SMP).
- Hanya Kabupaten Poso yang masih tercatat Belum Tuntas Wajar, sehingga perlu perhatian dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah.

Kesimpulan umum terkait dengan angka partisipasi kasar di atas, yaitu:

- Pemerataan akses pendidikan dasar (SD) sudah tercapai di seluruh kabupaten/kota.
- Akses PAUD masih rendah dan belum merata, terutama di wilayah pesisir dan perkotaan tertentu.

- Partisipasi SMP dan SMA menurun secara bertahap, menandakan adanya tantangan pada jenjang transisi dan keberlanjutan pendidikan.
- Upaya percepatan Wajar 9 Tahun dan Wajar 13 Tahun perlu difokuskan pada daerah dengan APK SMP dan SMA yang masih di bawah 90%.

Implikasi Kebijakan dalam meningkatkan pemerataan dan partisipasi pendidikan, diperlukan langkah strategis, berikut:

- Pemerataan layanan PAUD dan pendidikan menengah di daerah kepulauan dan pedesaan.
- Program afirmasi bagi keluarga kurang mampu agar anak tetap melanjutkan sekolah hingga SMA.
- Peningkatan mutu dan kapasitas lembaga PAUD agar lebih menarik bagi masyarakat.
- Peningkatan peran pemerintah daerah dan BPMP dalam memantau dan mempercepat ketuntasan Wajar 9 dan 13 Tahun.

1.1.1.4 APM Jenjang PAUD - SMA/SMK

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah peserta didik yang berusia sesuai (usia ideal) untuk suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap total penduduk pada kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Berikut data APM di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1. 3 Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD hingga SMA/SMK berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Wilayah	APM (Angka Partisipasi Murni)			
		PAUD	SD	SMP	SMA/SMK
1	Kab. Banggai Kepulauan	71,98	98,33	71,49	62,19
2	Kab. Buol	64,33	96,79	77,61	63,86
3	Kab. Parigi Moutong	69,92	96,18	79,18	62,39
4	Kab. Banggai Laut	60,2	95,95	71,06	55,61
5	Kab. Tojo Una-Una	64,2	95,68	80,53	66,73
6	Kab. Sigi	57,1	95,28	77,12	60,01
7	Kab. Donggala	49,7	94,91	80,5	55,6
8	Kota Palu	37,04	94,6	81,22	75,18
9	Kab. Poso	68,14	94,17	85,48	77,26
10	Kab. Morowali Utara	53,13	93,59	79	69,43
11	Kab. Banggai	64,95	93,46	73,5	63,93
12	Kab. Morowali	43,27	92,33	78,29	70,39
13	Kab. Tolitoli	53,25	91,9	67,04	66,28
14	Prov. Sulawesi Tengah	58,78	94,83	77,56	65,62

Sumber Data: Dashboard Wajar 13 Tahun Kemendikdasmen

Secara umum, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan capaian yang cukup baik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), namun masih terdapat kesenjangan signifikan pada jenjang PAUD dan SMA/SMK. Rata-rata provinsi menunjukkan:

- PAUD = 58,78%,
- SD = 94,83%,
- SMP = 77,56%,
- SMA/SMK = 65,62%.

Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi anak pada usia idealnya. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam keberlanjutan dan transisi antarjenjang pendidikan.

a. Jenjang PAUD

APM PAUD masih tergolong rendah (rata-rata 58,78%), menandakan belum semua anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini.

- Capaian tertinggi terdapat di Kab. Banggai Kepulauan (71,98%), diikuti Parigi Moutong (69,92%) dan Poso (68,14%).
- Capaian terendah terjadi di Kota Palu (37,04%), Kab. Morowali (43,27%), dan Donggala (49,7%).

Faktor penyebab rendahnya partisipasi PAUD antara lain kurangnya satuan PAUD di wilayah terpencil, masih rendahnya kesadaran orang tua, dan keterbatasan guru PAUD berkualitas.

b. Jenjang SD

APM SD di Sulawesi Tengah sudah tinggi (rata-rata 94,83%), menunjukkan hampir semua anak usia 7–12 tahun telah bersekolah.

- Capaian tertinggi dicapai oleh Kab. Banggai Kepulauan (98,33%) dan Buol (96,79%),
- Sedangkan capaian terendah terdapat di Kab. Morowali (92,37%) dan Morowali Utara (93,93%).

Kondisi ini mencerminkan bahwa akses pendidikan dasar telah relatif merata, meskipun masih perlu peningkatan di wilayah dengan geografis sulit atau sebaran penduduk jarang.

c. Jenjang SMP

APM SMP rata-rata 77,56%, menandakan bahwa sekitar 22% anak usia 13–15 tahun belum bersekolah di jenjang yang semestinya.

- Capaian tertinggi diperoleh Kab. Donggala (85,05%), Kab. Buol (77,61%), dan Kab. Sigi (77,12%).
- Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Kab. Banggai Laut (71,06%), Banggai Kepulauan (71,49%), dan Tolitoli (67,04%).

Masih rendahnya partisipasi pada jenjang SMP mengindikasikan adanya masalah transisi dari SD ke SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan sarana dan jarak sekolah yang jauh.

d. Jenjang SMA/SMK

APM SMA/SMK di tingkat provinsi tercatat 65,62%, yang berarti lebih dari sepertiga remaja usia 16–18 tahun belum mengenyam pendidikan menengah.

- Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah Tojo Una-una (66,73%), Buol (63,86%), dan Sigi (60,01%).
- Sedangkan capaian terendah berada di Kab. Banggai Laut (55,61%), Donggala (55,6%), dan Kota Palu (58,75%).

Kesenjangan ini menunjukkan tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan menengah, baik karena keterbatasan daya tampung sekolah, faktor ekonomi keluarga, maupun minat melanjutkan sekolah.

Analisis Perbandingan Wilayah sebagai berikut:

- Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan menunjukkan performa relatif stabil di semua jenjang, menandakan konsistensi partisipasi pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK.

- Kabupaten Donggala dan Banggai Laut memperlihatkan ketimpangan antarjenjang — APM SD tinggi, tetapi APM SMP dan SMA/SMK menurun tajam.
- Kota Palu, meskipun merupakan ibu kota provinsi, justru memiliki APM PAUD paling rendah, yang perlu ditinjau dari aspek urbanisasi dan preferensi pendidikan dini nonformal.

Berdasarkan analisis ini, beberapa langkah strategis yang perlu ditekankan dalam Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Peningkatan akses dan layanan PAUD melalui pendirian PAUD baru di desa terpencil, peningkatan kompetensi guru PAUD, dan kampanye kesadaran pentingnya pendidikan usia dini.
2. Penguatan transisi SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK melalui program *Wajar 13 Tahun* dan *back to school*.
3. Pendampingan daerah dengan APM rendah untuk penyusunan peta jalan peningkatan partisipasi sekolah.
4. Integrasi data APM dan ATS (Anak Tidak Sekolah) dalam *dashboard mutu pendidikan* untuk perencanaan intervensi berbasis data.
5. Mendorong kolaborasi lintas sektor (pendidikan, sosial, dan ekonomi) untuk mengatasi faktor kemiskinan dan geografis yang menghambat partisipasi sekolah.

Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mempertahankan tingkat partisipasi tinggi di jenjang SD, namun masih menghadapi tantangan signifikan pada PAUD, SMP, dan SMA/SMK. Rendahnya APM pada jenjang awal dan akhir pendidikan menandakan perlunya penguatan layanan PAUD dan perluasan akses pendidikan menengah agar keberlanjutan program Wajar 13 Tahun dapat tercapai secara menyeluruh.

1.1.1.5 Kondisi Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pada tabel berikut menunjukkan kondisi terkini jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

- BPB (Belum Pernah Bersekolah), terdapat data NIK anak usia sekolah pada aplikasi dukcapil yang tidak ditemukan pada dapodik maupun emis.

- DO (Drop Out/Putus Sekolah), data NIK yang pernah ada di jenjang kelas tertentu pada dapodik dan emis, namun sebelum lulus sudah hilang/keluar pada jenjang kelas di atasnya.
- LTM (Lulus Tidak Melanjutkan), data NIK tidak ditemukan pada jenjang pendidikan di atasnya (SMP dan SMA/SMK).

Tabel 1. 4 Kondisi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	BPB	DO	LTM	Total
1	Kab. Banggai Kepulauan	1347	763	948	3058
2	Kab. Donggala	5225	1997	2680	9902
3	Kab. Poso	4234	995	873	6102
4	Kab. Banggai	3422	1481	1423	6326
5	Kab. Buol	1157	1462	1584	4203
6	Kab. Tolitoli	2366	1409	2063	5838
7	Kab. Morowali	1609	974	868	3451
8	Kab. Parigi Moutong	8402	2425	3537	14364
9	Kab. Tojo Una Una	2016	1516	1810	5342
10	Kab. Sigi	3835	997	1259	6091
11	Kab. Banggai Laut	668	370	373	1411
12	Kab. Morowali Utara	1788	705	676	3169
13	Kota Palu	1288	1283	1055	3626
Jumlah		37.357	16.377	19.149	72.883

Sumber Data: Dashboard ATS Kemendikdasmen, update 13 Oktober 2025

Total keseluruhan ATS di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 72.883 anak, dengan sebaran dan karakteristik yang cukup bervariasi antarwilayah. Secara keseluruhan jumlah ATS setiap jenis sebagai berikut:

- BPB mencapai 37.357 anak (51,3%), merupakan kategori terbesar dari total ATS.
- DO sebanyak 16.377 anak (22,5%), menunjukkan masih adanya kasus putus sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA.
- LTM sebanyak 19.149 anak (26,2%), menggambarkan bahwa banyak anak yang sudah menamatkan sekolah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Data anak belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus perlu diverifikasi dan validasi (verval) sebelum dilakukan penanganannya. Tiga daerah dengan jumlah ATS tertinggi adalah:

1. Kabupaten Parigi Moutong – 14.364 anak
2. Kabupaten Banggai – 6.326 anak
3. Kabupaten Poso – 6.102 anak

Ketiganya menyumbang hampir lebih dari sepertiga total ATS provinsi. Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi tertinggi pada seluruh kategori (BPB, DO, dan LTM), yang menandakan perlu adanya intervensi khusus dan lintas sektor untuk memperluas akses dan memperkuat program penarikan anak ke sekolah.

Daerah dengan jumlah ATS terendah adalah:

1. Kabupaten Morowali Utara (3.169 anak),
2. Kabupaten Banggai Laut (3.176 anak), dan
3. Kota Palu (3.268 anak).

Meskipun jumlahnya relatif kecil, daerah-daerah ini tetap perlu mempertahankan dan memperkuat kebijakan pendidikan inklusif serta program penuntasan wajib belajar 13 tahun agar tidak terjadi peningkatan kembali jumlah ATS. Analisis Berdasarkan Kategori sebagai berikut:

- **Belum Pernah Bersekolah (BPB):**
Jumlah tertinggi ditemukan di Kabupaten Donggala (5.225 anak) dan Parigi Moutong (4.802 anak). Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya jangkauan layanan PAUD dan pendidikan dasar di beberapa kecamatan pedalaman dan pesisir.
- **Putus Sekolah (DO):**
Jumlah tertinggi juga berada di Donggala (1.997 anak) dan Tojo Una-Una (1.516 anak). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, jarak ke sekolah, atau minimnya dukungan lingkungan belajar.
- **Lulus Tidak Melanjutkan (LTM):**
Angka tertinggi terdapat di Parigi Moutong (3.357 anak) dan Banggai (1.423 anak). Fakta ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmasi agar anak-anak yang sudah lulus SMP dapat melanjutkan ke SMA/ sederajat tanpa terkendala biaya atau ketersediaan sekolah.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi strategis bagi perencanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Penguatan program penarikan kembali ATS (re-enrollment) melalui kolaborasi lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan aparat desa).
2. Perluasan akses PAUD dan SD di wilayah dengan jumlah BPB tinggi, seperti Donggala dan Parigi Moutong.
3. Program pencegahan putus sekolah (DO) dengan pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat, termasuk pemberian bantuan pendidikan dan layanan konseling.
4. Intervensi bagi anak LTM melalui pendidikan kesetaraan, beasiswa afirmatif, dan pelatihan vokasi bagi remaja.
5. Pemanfaatan data ATS secara berkelanjutan untuk perencanaan, pelacakan, dan evaluasi kebijakan wajib belajar 13 tahun.

Tabel 1. 5 Data ATS Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No	Kabupaten/Kota	Status Verifikasi												Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Total	
		v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9	v_10	v_11	v_12				v_13
1	Kab. Banggai Kepulauan	320	17	52	82	178	0	0	72	0	13	1	2	4	741	2.297	3038
2	Kab. Donggala	655	39	25	319	353	0	0	116	1	10	0	17	0	1.535	8.335	9870
3	Kab. Poso	310	45	46	84	260	0	0	169	1	85	0	4	120	1.124	4.947	6071
4	Kab. Banggai	168	89	57	113	241	0	0	105	0	3	0	1	0	777	5.499	6276
5	Kab. Buol	681	109	114	204	857	0	0	125	0	50	0	23	8	2.171	2.009	4180
6	Kab. Tolitoli	689	35	61	127	386	0	0	104	1	10	0	0	0	1.413	4.415	5828
7	Kab. Morowali	207	43	12	153	228	0	0	78	0	33	1	0	0	755	2.681	3436
8	Kab. Parigi Moutong	2.186	84	103	365	1.466	0	0	299	4	86	0	175	352	5.12	9.076	14196
9	Kab. Tojo Una Una	332	40	86	59	375	0	0	70	0	21	0	0	0	983	4.347	5330
10	Kab. Sigi	227	14	10	46	121	0	0	59	1	5	0	0	0	483	5.579	6062
11	Kab. Banggai Laut	153	21	14	51	130	0	0	35	0	3	0	4	15	426	982	1408
12	Kab. Morowali Utara	50	12	9	133	103	0	0	25	0	2	0	0	0	334	2.832	3166
13	Kota Palu	297	50	35	128	149	0	0	164	2	68	0	0	0	893	2.696	3589
Jumlah		6.275	598	624	1.864	4.847	0	0	1.421	10	389	2	226	499	16.755	55.695	72450

Sumber Data: Dashboard ATS Kemendikdasmen, update 13 Oktober 2025

Keterangan status approval:

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia

v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Tabel 1.5 menunjukkan total 72.450 individu anak tidak sekolah yang terdata di 13 Kabupaten/Kota dengan:

- Sebanyak 16.755 (sekitar 23.13%) sudah verifikasi.
- Sebanyak 55.695 (sekitar 76.87%) belum verifikasi.

Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar data ATS masih memerlukan verifikasi di lapangan untuk menentukan status keberadaan ATS.

Total Kasus ATS Tertinggi dan Terendah berdasarkan Kabupaten/kota adalah:

- Kab. Parigi Moutong memiliki jumlah ATS yang sangat tinggi, hampir dua kali lipat dari Kabupaten/Kota di peringkat kedua (Kab. Donggala).
- Kab. Morowali dan Kab. Banggai Kepulauan menunjukkan tingkat verifikasi yang paling baik (di atas 75%), yang berarti data status ATS di wilayah ini relatif lebih akurat.
- Kab. Toli-Toli memiliki persentase verifikasi yang relatif rendah, menunjukkan masih banyak data yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 1. 6 Data ATS Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No	Kabupaten/Kota	Alasan Verifikasi																		Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Total	
		k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_9	k_10	k_11	k_12	k_13	k_14	k_15	k_16	k_17	k_18				k_19
1	Kab. Banggai Kepulauan	242	43	5	15	101	0	134	34	6	0	0	14	83	0	3	4	1	0	10	695	2.343	3.038
2	Kab. Donggala	386	51	40	69	249	0	444	68	0	0	0	15	188	0	1	19	2	6	4	1.543	8.322	9.865
3	Kab. Poso	195	44	6	6	102	0	203	21	0	0	0	22	272	0	4	5	2	1	72	955	5.114	6.069
4	Kab. Banggai	190	30	5	23	95	0	107	3	0	1	0	8	217	0	3	21	0	1	1	705	5.562	6.267
5	Kab. Buol	952	87	20	15	178	0	437	45	3	0	0	24	298	0	2	7	0	0	43	2.112	2.068	4.18
6	Kab. Tolitoli	465	131	33	43	140	0	331	36	11	0	0	10	131	0	1	9	0	2	1	1.344	4.476	5.82
7	Kab. Morowali	186	24	5	25	79	0	146	18	0	0	0	5	127	0	0	15	1	1	9	641	2.786	3.427
8	Kab. Parigi Moutong	1.192	253	35	65	381	0	773	83	17	2	0	50	1.958	0	19	44	8	5	111	4.998	9.184	14.182
9	Kab. Tojo Una Una	412	61	15	20	95	0	155	39	0	0	0	14	124	0	1	1	1	1	9	948	4.378	5.326
10	Kab. Sigi	82	8	2	63	59	0	135	8	4	0	0	5	49	0	0	2	1	4	0	422	5.636	6.058
11	Kab. Banggai Laut	150	16	3	1	75	0	40	20	0	0	0	10	83	0	0	7	0	0	9	414	989	1.403
12	Kab. Morowali Utara	94	4	2	11	35	1	59	15	0	0	0	4	81	0	1	3	0	0	1	311	2.854	3.165
13	Kota Palu	116	24	10	11	116	0	191	16	2	0	0	8	148	0	1	7	1	2	10	663	2.923	3.586
Jumlah		4.662	776	181	367	1.705	1	3.155	406	43	3	0	189	3.759	0	36	144	17	23	280	15.751	56.635	72.386

Sumber Data: Dashboard ATS Kemendikdasmen, update 14 Oktober 2025

Keterangan alasan approval:

- | | |
|---|--|
| k_1. Tidak mau bersekolah | k_9. Beranggapan sekolah tidak penting |
| k_2. Tidak ada biaya | k_10. Tidak memiliki seragam sekolah |
| k_3. Sekolah jauh dari rumah | k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran |
| k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini | k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas |
| k_5. Menikah / mengurus rumah tangga | k_13. Lainnya |
| k_6. Mengalami kekerasan/ perundungan/trauma di sekolah | |
| k_7. Bekerja | |
| k_8. Pengaruh lingkungan/teman | |

1.1.1.6 Perkembangan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun

Hubungan antara penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan progres penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun sangat erat dan bersifat kausal langsung, semakin efektif penanganan ATS, semakin besar kemajuan pencapaian program wajib belajar. Program Wajib Belajar 13 Tahun menargetkan seluruh anak usia 6–18 tahun agar memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah minimal sampai tamat SMA/SMK. Namun, keberadaan ATS (anak usia sekolah yang tidak terdaftar atau tidak aktif di satuan pendidikan) menunjukkan adanya kesenjangan akses dan menjadi indikator utama bahwa kewajiban belajar belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, penurunan ATS secara langsung mencerminkan kemajuan progres penuntasan wajib belajar. Program wajib belajar tidak hanya fokus pada penyediaan sekolah, tetapi juga pada mekanisme memastikan setiap anak belajar. Oleh karena itu, penanganan ATS adalah strategi inti (core strategy) dalam mempercepat pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah-langkah berikut berfungsi menutup celah anak yang tertinggal dari sistem pendidikan, sehingga mendukung penuntasan program wajib belajar 13 tahun.

- Identifikasi, verifikasi dan validasi data ATS (melalui Verval ATS, survei sekolah, atau data Dapodik),
- Rekrutmen dan rujukan kembali (re-enrollment) ke sekolah formal, nonformal, atau kesetaraan,
- Program beasiswa / bantuan sosial pendidikan,
- Pendidikan alternatif (PKBM, SKB, homeschooling, kelas jauh), dan
- Kolaborasi lintas sektor (pendidikan, sosial, desa, dan masyarakat)

Penanganan ATS adalah variabel pengungkit (leverage variable) bagi hampir semua indikator utama keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun. Program wajar 13 tahun memastikan mereka kembali bersekolah, pemerintah mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 1. 7 Data ATS – Drop Out (DO) yang Aktif Kembali di Sekolah Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No	Kabupaten / Kota	ATS-Drop Out (DO)				Total
		PAUD	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	
1	Kab. Banggai Kepulauan	0	337	211	507	1.055
2	Kab. Donggala	0	746	458	901	2.105
3	Kab. Poso	0	353	248	611	1.212
4	Kab. Banggai	1	530	529	884	1.944
5	Kab. Buol	0	258	206	345	809
6	Kab. Tolitoli	1	425	295	385	1.106
7	Kab. Morowali	0	480	316	579	1.375
8	Kab. Parigi Moutong	1	1.481	631	1.423	3.536
9	Kab. Tojo Una Una	0	367	231	573	1.171
10	Kab. Sigi	0	693	633	1.237	2.563
11	Kab. Banggai Laut	0	287	95	267	649
12	Kab. Morowali Utara	0	287	198	314	799
13	Kota Palu	2	719	457	865	2.043
Jumlah		5	6.963	4.508	8.891	20.367

Sumber Data: Dashboard ATS Kemendikdasmen, update 13 Oktober 2025

Data pada Tabel 1.7 menunjukkan bahwa hingga 13 Oktober 2025 terdapat 20.367 anak tidak sekolah/*drop out* yang telah aktif kembali bersekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebaran per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

- PAUD: 5 anak (0,02%)
- SD: 6.963 anak (34,2%)
- SMP: 4.508 anak (22,1%)
- SMA/SMK: 8.891 anak (43,7%)

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang berhasil dikembalikan ke sekolah berasal dari jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK), diikuti oleh jenjang dasar (SD).

1. Jenjang PAUD

- Jumlah sangat kecil (5 anak) yang kembali aktif, menunjukkan bahwa penanganan ATS di usia dini relatif tidak menjadi fokus utama karena program wajib belajar dimulai dari SD.
- Namun, hal ini tetap penting sebagai indikator keterpaduan layanan pendidikan anak usia dini menuju pendidikan dasar.

2. Jenjang SD (Dasar)

- Total 6.963 anak kembali bersekolah.
- Kabupaten dengan jumlah tertinggi adalah Kab. Parigi Moutong (1.481 anak) dan Kab. Donggala (746 anak).
- Hal ini mengindikasikan masih tingginya angka ATS usia sekolah dasar di wilayah tersebut, namun juga menunjukkan keberhasilan program penjangkauan di daerah dengan populasi besar dan sebaran wilayah luas.

3. Jenjang SMP (Menengah Pertama)

- Total 4.508 anak kembali bersekolah.
- Kabupaten dengan jumlah tertinggi adalah Kab. Parigi Moutong (631 anak) dan Kab. Banggai (529 anak).
- Jumlah ini menunjukkan adanya intervensi efektif di tingkat menengah pertama, namun tetap menggambarkan tantangan keberlanjutan transisi SD–SMP di daerah-daerah pedesaan dan pesisir.

4. Jenjang SMA/SMK (Menengah Atas)

- Total 8.891 anak kembali bersekolah, tertinggi di antara semua jenjang.
- Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah Kab. Donggala (901 anak), Kab. Parigi Moutong (1.423 anak), dan Kab. Sigi (1.237 anak).
- Fenomena ini menunjukkan bahwa dropout di tingkat SMA/SMK relatif tinggi, tetapi ada komitmen kuat untuk memulihkan partisipasi melalui program re-enrollment dan pendidikan kesetaraan.

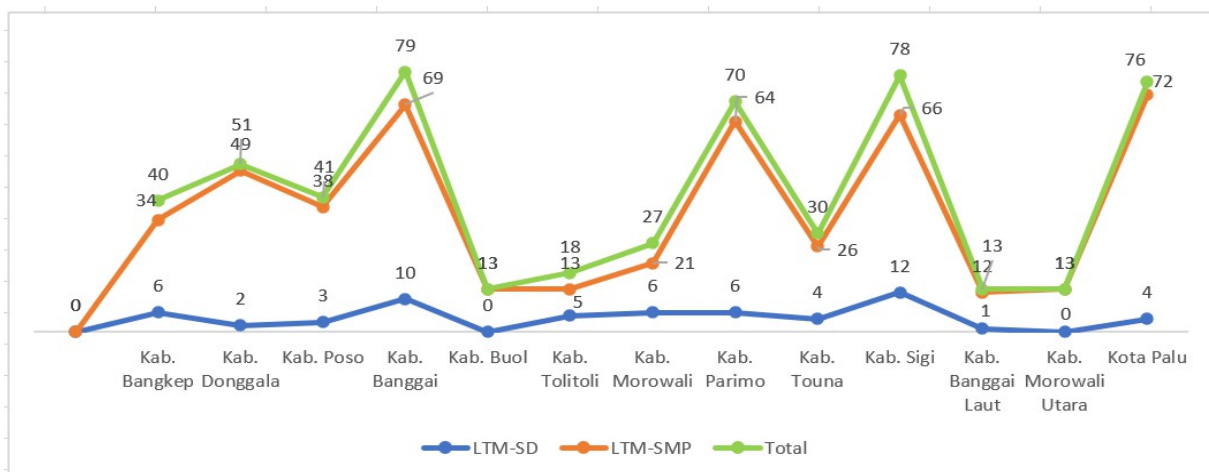
Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi tertinggi dengan 3.536 anak yang kembali bersekolah. Ini mencerminkan keberhasilan upaya lintas sektor di kabupaten tersebut dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Kabupaten Sigi dan Donggala juga menunjukkan capaian tinggi, menandakan efektivitas program penjangkauan, meskipun secara geografis wilayahnya cukup menantang. Kabupaten Buol dan Morowali Utara termasuk yang terendah (masing-masing di bawah 1.000 anak), bisa jadi karena populasi penduduk usia sekolah relatif kecil atau data ATS yang sudah lebih terkendali.

Data ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penanganan anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah. Kembalinya lebih dari 20 ribu anak ke sekolah menandakan langkah nyata menuju penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun, terutama di tingkat menengah. Peningkatan partisipasi di jenjang SMA/SMK berkontribusi langsung terhadap kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah. Namun, tingginya angka ATS yang kembali aktif juga mengindikasikan bahwa dropout di jenjang menengah masih cukup besar, sehingga dibutuhkan program pencegahan berkelanjutan agar anak yang telah kembali tidak kembali keluar dari sistem pendidikan.

Penanganan ATS terbukti menjadi motor penggerak utama percepatan pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun. Diperlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan anak-anak yang sudah kembali bersekolah agar tidak drop out kembali. BPMP bersama Dinas Pendidikan perlu memperkuat:

- o Kolaborasi lintas sektor (Desa, Dinas Sosial, PKH, PPA) dalam deteksi dan penanganan ATS baru,
- o Program remedial dan dukungan finansial (bantuan biaya sekolah, beasiswa),
- o Pendidikan alternatif dan kesetaraan untuk menjangkau anak di daerah terpencil.

Dengan konsistensi program, Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi mencapai penurunan signifikan ATS dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun pada periode Renstra mendatang.



Gambar 1. 4 Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

Sumber Data: Dashboard ATS Kemendikdasmen, update 13 Oktober 2025

Grafik pada Gambar 1.4 menunjukkan jumlah peserta didik lulus tetapi tidak melanjutkan sekolah (LTM) yang telah aktif kembali bersekolah di berbagai jenjang (SD dan SMP) di 13 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah. Data ini mencerminkan keberhasilan program *penjangkauan kembali (re-enrollment)* terhadap anak-anak yang sebelumnya telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Secara umum, pola grafik memperlihatkan variasi cukup tajam antarwilayah, dengan konsentrasi tertinggi pada Kabupaten Banggai (79 anak), Kabupaten Parigi Moutong (70 anak), Kabupaten Sigi (78 anak), dan Kota Palu (76 anak).

1. Jenjang LTM-SD (Lulus SD Tidak Melanjutkan ke SMP)

- o Jumlah LTM-SD yang berhasil kembali bersekolah relatif kecil di semua daerah, dengan angka tertinggi hanya 6 anak di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.
- o Sebagian besar kabupaten/kota mencatat hanya 0–5 anak.
- o Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak lulusan SD di Sulawesi Tengah masih melanjutkan ke SMP, namun masih ada sebagian kecil yang sempat terputus sebelum akhirnya direkrut kembali.

2. Jenjang LTM-SMP (Lulus SMP Tidak Melanjutkan ke SMA/SMK)

- o Angka pada kategori ini jauh lebih tinggi dibanding LTM-SD.
- o Puncak tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai (79 anak), Kabupaten Parigi Moutong (64 anak), Kabupaten Sigi (78 anak), dan Kota Palu (72 anak).
- o Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penuntasan wajib belajar 13 tahun ada pada transisi dari SMP ke SMA/SMK, terutama karena faktor ekonomi, jarak sekolah, dan minimnya dukungan transportasi di daerah pedesaan dan kepulauan.

Kabupaten Banggai, Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu menonjol dengan jumlah anak LTM aktif kembali di atas 70 anak. Ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten dengan jumlah penduduk besar dan pusat aktivitas pendidikan memiliki potensi intervensi yang signifikan. Kabupaten Donggala dan Poso berada di tingkat menengah (sekitar 40–50 anak). Kabupaten Buol, Morowali, Banggai Laut, dan Morowali Utara memiliki angka paling rendah (di bawah 20 anak), yang bisa disebabkan oleh jumlah lulusan lebih kecil atau tingkat pelaporan data yang belum optimal. Pola ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk lebih

tinggi cenderung memiliki jumlah LTM aktif kembali lebih banyak, namun juga mengandung potensi lebih besar terjadinya anak lulus yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Keberhasilan mengembalikan anak-anak LTM-SMP menjadi indikator penting peningkatan akses ke pendidikan menengah (SMA/SMK). Data ini memperkuat temuan bahwa titik kritis Wajib Belajar 13 Tahun ada pada transisi SMP–SMA, sehingga dibutuhkan intervensi afirmatif seperti:

- Beasiswa transisi SMP ke SMA/SMK,
- Penyediaan moda transportasi pendidikan,
- Penguatan komunikasi orang tua-sekolah tentang pentingnya pendidikan menengah, serta
- Keterlibatan desa dan lembaga sosial dalam memastikan anak-anak yang lulus tidak berhenti belajar.

Data pada Gambar 4 juga menunjukkan bahwa dari seluruh kabupaten/kota, jumlah anak lulusan yang sempat tidak melanjutkan sekolah dan kini aktif kembali paling banyak berasal dari jenjang SMP ke SMA/SMK. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat strategi transisi antarjenjang terutama di tingkat menengah atas agar tidak terjadi kehilangan peserta didik (*learning discontinuity*). Dengan terus memperluas cakupan penanganan LTM, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota berpeluang mempercepat pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun secara berkelanjutan.

Penyempurnaan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun merupakan langkah strategis Pemerintah untuk menciptakan generasi unggul dan menjawab tantangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang masih memerlukan peningkatan. Program ini memperluas cakupan pendidikan wajib yang semula hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, kini memasukkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi awal. Fokus kebijakan ini di Sulawesi Tengah menegaskan komitmen daerah dalam memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak usia dini hingga menengah.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tengah mengambil peran sentral sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengadvokasi implementasi Wajar 13 Tahun kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan advokasi ini dirancang dengan melibatkan ekosistem pendidikan dan pembangunan yang luas, yaitu Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Disdukcapil. Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan kesadaran bahwa penuntasan Wajib 13 Tahun, terutama penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), memerlukan kerja sama kolektif yang terintegrasi.

Titik puncak dari kegiatan advokasi yang dilaksanakan BPMP Sulawesi Tengah adalah penandatanganan Komitmen Bersama antara BPMP dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komitmen ini secara legal formal menjadi payung sinergi antar-lembaga untuk menggerakkan sumber daya dan kebijakan dalam rangka penuntasan wajib belajar. Lebih lanjut, dari forum advokasi tersebut dihasilkan pula Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Forum Penanganan ATS oleh masing-masing Pemda. Pembentukan tim lintas OPD ini memastikan adanya struktur kelembagaan yang bertanggung jawab, berwenang, dan terkoordinasi dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengintervensi kasus-kasus ATS di lapangan.

Langkah BPMP selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data ATS, yang merupakan tahapan krusial untuk menghasilkan data yang akurat dan berbasis bukti. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada teknis data, tetapi juga menjadi wadah klarifikasi kebijakan yang melibatkan kembali lintas OPD. Penerbitan Surat Edaran penyelesaian verval ATS oleh Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Dinas PMD menjadi output kebijakan yang penting, memastikan adanya keseragaman panduan operasional di tingkat pelaksana. Kerjasama ini bertujuan untuk Mensinkronkan data pendidikan dengan data kependudukan dan data sosial, sehingga pemetaan ATS benar-benar akurat dan mencakup semua dimensi sosial ekonomi.

Validitas data ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi daerah untuk menentukan tindak lanjut yang tepat bagi setiap kategori ATS, mulai dari penyediaan layanan pendidikan formal, nonformal, hingga program pengembalian anak ke sekolah. Secara spesifik, penanganan ATS melalui validasi data dan pembentukan tim lintas OPD menjadi fondasi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun. RAD ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat target, strategi, dan kegiatan konkret daerah untuk mengurangi angka ATS dan meningkatkan APS. Dengan adanya SK Tim dan Komitmen Bersama, RAD akan memiliki legitimasi dan dukungan anggaran yang kuat dari berbagai sektor, tidak hanya terbatas pada anggaran Dinas Pendidikan.

Perkembangan ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari sekadar implementasi kebijakan pusat menjadi kepemilikan daerah terhadap masalah pendidikan. Deklarasi Wajar 13 Tahun oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota Sulawesi Tengah menjadi bukti dukungan politik tertinggi. Upaya BPMP Sulteng melalui advokasi, komitmen bersama, dan pendampingan verval data ATS telah berhasil menstimulasi ekosistem pendidikan daerah untuk bergerak serentak, menjadikan penuntasan Wajar 13 Tahun dan penanganan ATS sebagai agenda pembangunan prioritas.

Dengan sinergi yang telah dibangun dan komitmen lintas OPD yang diresmikan, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kesiapan yang matang untuk menuntaskan Wajar 13 Tahun, tidak hanya di atas kertas tetapi melalui langkah-langkah terukur. Harapannya, upaya ini akan memastikan seluruh anak di Sulawesi Tengah, termasuk yang tergolong ATS, dapat memperoleh hak pendidikannya secara penuh dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sekaligus menyongsong Generasi Emas 2045.

1.1.1.7 Sistem Penerimaan Murid Baru

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan momen kritis dalam siklus pendidikan nasional karena berpengaruh langsung pada pemerataan akses, kualitas layanan, serta kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Pada 2025 terjadi transformasi kebijakan dan terminologi yang penting — pemerintah pusat memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan sejumlah aturan PPDB sebelumnya dan merombak beberapa ketentuan teknis dan kuota jalur penerimaan. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berupaya menjawab kritik yang mengemuka selama pelaksanaan PPDB beberapa tahun terakhir terkait ketimpangan akses, manipulasi jarak zonasi, dan potensi kecurangan.

Landasan tersentralisasi bagi pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Peraturan ini menjadi rujukan bagi sekolah negeri (TK/SD/SMP/SMA/SMK) dan pemerintah daerah dalam merancang tata cara, kuota jalur, serta mekanisme pendaftaran dan seleksi. Penggantian istilah dari PPDB ke SPMB dimaksudkan untuk memberi makna bahwa sistem yang berlaku telah disempurnakan — bukan sekadar proses pendaftaran tetapi sistem terpadu yang mengatur kuota, jalur, verifikasi data, dan

mekanisme pengaduan. Pelaksanaan teknis kemudian disosialisasikan oleh Direktorat terkait pada awal semester 2025 agar daerah dan sekolah menyesuaikan kalender pendaftaran dan persyaratan.

Salah satu unsur paling terlihat dari SPMB 2025 adalah penataan ulang jalur penerimaan dan kuota minimal yang harus dipenuhi setiap sekolah. Secara garis besar kebijakan mengatur kombinasi jalur domisili (pengganti istilah zonasi), afirmasi, prestasi, dan mutasi/pindah tugas, dengan besaran kuota yang dipatok menurut jenjang (SD, SMP, SMA). Tujuan utama penataan ulang ini adalah: (1) memastikan anak bersekolah di lingkungan terdekat secara adil (domisili), (2) memberikan ruang memadai bagi anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas (jalur afirmasi), (3) tetap memberi peluang bagi siswa berprestasi untuk mengakses sekolah favorit (jalur prestasi), dan (4) mengakomodir perpindahan tugas orang tua/guru (jalur mutasi). Ketentuan kuota yang diumumkan publik pada 2025 memberi batas bawah/batas minimal untuk tiap jalur agar jumlah alokasi tidak sepenuhnya dikuasai satu jenis jalur sehingga mengurangi praktik seleksi terselubung.

Tabel 1. 8 Persentase Kuota per Jalur Jenjang SD berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kuota per Jalur (%)				Total (%)
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	
1	Kab. Banggai	80	15	0	5	100
2	Kab. Banggai Kepulauan	80	15	0	5	100
3	Kab. Banggai Laut	80	15	0	5	100
4	Kab. Buol	80	15	0	5	100
5	Kab. Donggala	80	15	0	5	100
6	Kab. Morowali	80	15	0	5	100
7	Kab. Morowali Utara	80	15	0	5	100
8	Kab. Parigi Moutong	80	15	0	5	100
9	Kab. Poso	80	15	0	5	100
10	Kab. Sigi	80	15	0	5	100
11	Kab. Tojo Una-Una	99,18	0,43	0	0,39	100
12	Kab. Tolitoli	80	15	0	5	100
13	Kota Palu	80	15	0	5	100

Berdasarkan Tabel 1.8, alokasi kuota penerimaan peserta didik baru jenjang SD tahun ajaran 2025/2026 di 13 kabupaten/kota menunjukkan pola distribusi yang relatif seragam, dengan mayoritas daerah menetapkan 80% kuota untuk jalur Domisili, 15% untuk Afirmasi, 0% untuk Prestasi, dan 5% untuk Mutasi. Pengecualian terdapat pada Kabupaten Tojo Una-Una yang menetapkan proporsi berbeda, yaitu 99,18% untuk Domisili, 0,43% untuk Afirmasi, dan 0,39% untuk Mutasi, tanpa kuota untuk jalur Prestasi. Seluruh kabupaten/kota tetap menjaga total kuota per jalur sebesar 100%, mencerminkan konsistensi dalam kebijakan distribusi kuota meskipun terdapat penyesuaian lokal. Data ini memberikan gambaran penting mengenai prioritas dan strategi penerimaan siswa baru di masing-masing wilayah, serta menunjukkan kecenderungan dominasi jalur Domisili dalam proses seleksi.

Tabel 1. 9 Persentase Kuota per Jalur Jenjang SMP berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kuota per Jalur (%)				Total (%)
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	
1	Kab. Banggai	50	20	25	5	100
2	Kab. Banggai Kepulauan	50	20	25	5	100
3	Kab. Banggai Laut	50	20	25	5	100
4	Kab. Buol	40	20	35	5	100
5	Kab. Donggala	50	20	25	5	100
6	Kab. Morowali	50	20	25	5	100
7	Kab. Morowali Utara	50	20	25	5	100
8	Kab. Parigi Moutong	50	20	25	5	100
9	Kab. Poso	50	20	25	5	100
10	Kab. Sigi	50	20	25	5	100
11	Kab. Tojo Una-Una	93,07	3,81	2,28	0,84	100
12	Kab. Tolitoli	50	20	25	5	100
13	Kota Palu	40	20	35	5	100

Berdasarkan Tabel 1.9, alokasi kuota penerimaan peserta didik baru jenjang SMP tahun ajaran 2025/2026 di 13 kabupaten/kota menunjukkan pola distribusi yang umumnya seragam, yaitu 50% untuk jalur Domisili, 20% untuk Afirmasi, 25% untuk Prestasi, dan 5% untuk Mutasi. Namun, terdapat pengecualian seperti Kabupaten Buol yang memberikan porsi lebih besar pada jalur Prestasi (35%) dan lebih kecil pada Domisili (40%), serta Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki distribusi kuota sangat berbeda dengan dominasi jalur Domisili sebesar 93,07% dan alokasi sangat kecil untuk jalur lainnya. Meskipun terdapat variasi antar daerah, total kuota per jalur di setiap kabupaten/kota tetap konsisten sebesar 100%, mencerminkan kebijakan penerimaan yang fleksibel namun tetap terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Tabel 1. 10 Rekap Daya Tampung Jenjang SD Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima
1	Kab. Banggai	336	375	10500	10500	10500
2	Kab. Bangkep	154	171	4788	4788	4788
3	Kab. Banggai Laut	80	99	2772	2772	2772
4	Kab. Buol	156	242	6776	6776	6776
5	Kab. Donggala	333	954	26712	26712	26712
6	Kab. Morowali	147	232	6521	6521	6521
7	Kab. Morowali Utara	133	157	4417	4417	4417
8	Kab. Parimo	395	440	12320	12320	12320
9	Kab. Poso	198	214	5992	5992	5992
10	Kab. Sigi	211	231	6546	6546	6546
11	Kab. Tojo Una-Una	182	202	5686	5686	5686
12	Kab. Tolitoli	219	300	8405	8405	8405
13	Kota Palu	131	209	5965	5965	5965
Total		2675	3826	107400	107400	107400

Berdasarkan Tabel 1.10, rekap daya tampung jenjang SD tahun ajaran 2025/2026 di 13 kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah total sekolah mencapai 2.675 dengan 3.826 rombongan belajar (rombel), menyediakan daya tampung sebanyak 107.400 siswa. Seluruh daya tampung ini telah terisi penuh, terbukti dari jumlah pendaftar dan jumlah diterima yang sama persis dengan kapasitas yang tersedia di masing-masing daerah. Kabupaten Donggala memiliki daya tampung tertinggi yaitu 26.712 siswa, sementara Kabupaten Banggai Laut memiliki daya tampung terendah sebesar 2.772 siswa. Data ini mencerminkan efisiensi dan

kesesuaian antara kapasitas sekolah dengan jumlah pendaftar di seluruh wilayah, serta menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan atau kelebihan daya tampung pada jenjang SD di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun ajaran tersebut.

Tabel 1. 11 Rekap Daya Tampung Jenjang SMP dan SMA Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jmlh sekolah	Jmlh Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima
1	Kab. Banggai	86	197	6304	6304	6304
2	Kab. Bangkep	52	85	2720	2720	2720
3	Kab. Banggai Laut	32	56	1792	1792	1792
4	Kab. Buol	59	101	3278	3278	3278
5	Kab. Donggala	89	397	12704	12704	12704
6	Kab. Morowali	35	105	3368	3368	3368
7	Kab. Morowali Utara	42	75	2418	2418	2418
8	Kab. Parimo	90	181	5792	5792	5792
9	Kab. Poso	66	121	3872	3872	3872
10	Kab. Sigi	57	110	3535	3535	3535
11	Kab. Tojo Una-Una	46	91	2912	2912	2912
12	Kab. Tolitoli	58	178	5709	5709	5709
13	Kota Palu	24	156	5023	5023	5023
14	Provinsi Sulawesi Tengah	177	806	29369	29369	29369
Total		913	1853	59427	88796	88796

Berdasarkan Tabel 1.11, rekap daya tampung jenjang SMP dan SMA di Provinsi Sulawesi Tengah tahun ajaran 2025/2026 menunjukkan bahwa terdapat total 913 sekolah dengan 1.853 rombongan belajar (rombel), menyediakan daya tampung sebanyak 59.427 siswa. Menariknya, jumlah pendaftar dan jumlah diterima mencapai 88.796 siswa, yang berarti seluruh pendaftar diterima, meskipun jumlah tersebut melebihi daya tampung yang tersedia. Hal ini dapat mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam kebijakan penerimaan atau penggunaan ruang belajar tambahan di beberapa wilayah. Data ini memberikan gambaran penting mengenai kapasitas dan efektivitas sistem penerimaan peserta didik baru di tingkat pendidikan menengah, serta menunjukkan pemerataan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Seiring transformasi menjadi SPMB, banyak pemerintah daerah meluncurkan portal SPMB berbasis web daerah yang terintegrasi dengan basis data nasional (mis. Dapodik/Dapodikdasmen). Pendaftaran dilakukan online melalui platform resmi daerah/sekolah yang memverifikasi data identitas, domisili (KK/Alamat), dan bukti kelayakan jalur afirmasi (mis. KIP, PKH, data DTKS). Tahapan biasanya meliputi: pengumuman daya

tampung dan jadwal; pendaftaran online; verifikasi berkas; seleksi/penetapan; pengumuman hasil; dan daftar ulang. Pemerintah juga mendorong tersedianya saluran pengaduan dan posko di sekolah untuk membantu siswa/ortu yang mengalami kesulitan pendaftaran digital. Beberapa daerah menggunakan kanal bantuan call center, live chat, atau loket offline agar keluarga yang tidak melek digital tetap terlayani.

Pada praktiknya, pelaksanaan SPMB 2025 menunjukkan variasi pengalaman antar daerah. Banyak kabupaten/kota berhasil melaksanakan proses pendaftaran dengan relatif tertib: pengumuman jadwal tepat waktu, kuota jalur diumumkan transparan, dan sistem online berjalan memadai. Sementara itu, sejumlah daerah mengalami masalah teknis pada hari-hari pendaftaran puncak: server lambat atau down, verifikasi berkas yang memakan waktu, dan keganjilan data saat pemrosesan otomatis. Sejumlah pihak menyorot kesiapan infrastruktur IT serta kapasitas SDM di tingkat dinas pendidikan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMB. Selain itu, peralihan istilah dan aturan mengundang kebingungan awal bagi sebagian wali murid yang masih mencari informasi di kanal lama PPDB.

Meskipun SPMB mencoba menetapkan kuota minimal untuk jalur domisili dan afirmasi, ketimpangan fasilitas pendidikan masih menjadi akar masalah. Sekolah-sekolah unggulan di perkotaan tetap menjadi target utama jalur prestasi, sementara sekolah di daerah 3T kekurangan daya tampung dan guru berkualitas sehingga peluang anak setempat untuk mendapatkan layanan berkualitas tetap terbatas. Penataan kuota tidak otomatis mengatasi kesenjangan kualitas infrastruktur—hal ini memerlukan intervensi anggaran dan peningkatan mutu yang terpisah dari mekanisme penerimaan. (lihat hasil kajian lapangan dan analisis akademis yang mengamati ketimpangan pasca-PPDB/SPMB).

Transformasi pendaftaran ke platform digital memang memberikan efisiensi tetapi juga memperlihatkan kelemahan: server down saat puncak pendaftaran, masalah validasi data terpadu (KK, Dapodik), dan ketergantungan pada jaringan internet yang tidak selalu stabil di daerah terpencil. Kasus gangguan teknis ini sempat memicu keluhan masif dari orang tua dan media lokal, memaksa dinas pendidikan membuka loket offline atau memperpanjang masa pendaftaran di beberapa wilayah. Ada catatan bahwa beberapa sistem lokal kurang melakukan uji beban (stress test) sehingga gagal saat jumlah pengguna simultan tinggi.

Sejumlah laporan menyoroti praktik manipulasi data (misal. penggantian alamat, peminjaman KK, atau “pindah domisili sementara”) untuk memenuhi syarat jalur domisili. Meskipun SPMB menekankan verifikasi data (KK, KTP terdata, dukungan Dapodik/DTKS), pelaku mencari celah administrasi. Hal ini memunculkan tuntutan agar verifikasi dilakukan lintas-institusi (Dukcapil, Dinas Sosial, Sistem Data Pendidikan) dengan protokol anti-penipuan yang lebih kuat. Selain itu, ada laporan awal tentang kecurangan terkait dokumen afirmasi atau pemalsuan bukti prestasi—masalah yang menuntut mekanisme pemeriksaan berkas fisik yang lebih ketat. Berita-berita awal 2025 bahkan melaporkan dugaan tindakan curang yang mempengaruhi persepsi publik terhadap fairness SPMB.

Perubahan kebijakan kuota serta mekanisme jalur memengaruhi dinamika pendaftaran antar-sekolah. Sekolah negeri favorit mengalami lonjakan pendaftar sementara beberapa sekolah negeri menengah-ke-rendah kehilangan siswa ke swasta karena orang tua memilih jalur prestasi atau sekolah swasta yang membuka pendaftaran dengan sistem berbeda. Di sisi lain, sekolah swasta merasakan tekanan finansial bila terjadi eksodus siswa atau perubahan preferensi keluarga. Studi lokal menunjukkan ketidakpastian ini mempengaruhi perencanaan anggaran sekolah dan kebutuhan tenaga pengajar.

Media dan organisasi masyarakat sipil aktif mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2025. Kritik utama datang dari hasil praktek di lapangan: kegagalan teknis, celah verifikasi data, serta ketimpangan akses. Sementara sebagian akademisi dan praktisi memuji tujuan kebijakan—terutama peningkatan porsi afirmasi untuk kelompok rentan—mereka juga menegaskan bahwa perubahan regulasi tanpa penguatan infrastruktur dan penanganan akar ketimpangan kualitas pendidikan hanya akan menghasilkan pergeseran masalah, bukan penyelesaian. Ada seruan bagi evaluasi independen pasca-pelaksanaan agar kebijakan dapat direvisi dengan bukti empiris.

Di level rumah tangga, SPMB 2025 berdampak pada perilaku pendaftaran keluarga: sebagian orang tua menjadi lebih proaktif mengumpulkan dokumen, mencari jalur alternatif (sekolah swasta, bimbel, atau surat pindah domisili), atau memanfaatkan jalur afirmasi bila memenuhi syarat. Tekanan pendaftaran juga memunculkan fenomena “perang surat” (pengurusan administrasi cepat) dan peningkatan permintaan layanan konsultasi PPDB/SPMB berbayar. Kelompok yang paling rentan tetap mereka yang keluarga miskinnya belum terekam dalam data

pemerintah (DTKS) atau yang tinggal di area tanpa akses internet memadai—mereka berisiko tertinggal jika mekanisme offline tidak cukup kuat.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi penting bagi kebijakan penerimaan murid baru di Indonesia. Peralihan ke SPMB dan penataan ulang jalur-kuota merupakan upaya pemerintah untuk membuat proses penerimaan lebih adil, transparan, dan terstruktur. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perubahan prosedural memerlukan penguatan pendukung: data yang terintegrasi dan terpercaya, infrastruktur digital yang kuat, mekanisme verifikasi yang anti-kecurangan, serta investasi berkelanjutan untuk menutup ketimpangan kualitas antarwilayah. Untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, SPMB harus dipandang sebagai salah satu bagian dalam rangkaian reformasi pendidikan yang lebih besar—bukan solusi tunggal. Dengan komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan proses penerimaan murid baru dapat berjalan lebih adil dan efektif di tahun-tahun mendatang.

1.1.1.8 Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi dalam pembangunan manusia dan bangsa. Sistem pendidikan yang baik membutuhkan tiga pilar sentral: (1) kurikulum yang relevan dan berorientasi masa depan, (2) tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi, serta (3) sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di antara ketiganya, aspek sarana dan prasarana seringkali menjadi kendala riil di lapangan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang karena biaya besar, akses sulit, serta prioritas pembangunan yang bergeser. Sekolah tanpa fasilitas yang memadai seakan “berjalan pincang” ruang kelas bocor, peralatan laboratorium rusak, toilet tidak layak, akses internet terbatas, dan begitu banyak kebutuhan lain yang belum tertangani. Maka dari itu, program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah bukanlah sekadar proyek fisik, tetapi upaya strategis untuk menjamin kesetaraan pendidikan, mutu pembelajaran, dan keamanan/kenyamanan belajar bagi seluruh peserta didik.

Jumlah pendanaan total revitalisasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebesar Rp 257.028.866 dengan jumlah penerima program sebanyak 345 sekolah. Jumlah ini mencapai 4.36% dari keseluruhan jumlah satuan pendidikan semua jenjang di Provinsi Sulawesi Tengah

yang berjumlah 7.903 Satuan Pendidikan. Sebaran penerima program revitalisasi untuk satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 1. 12 Sebaran Jenjang Satuan Pendidikan Penerima Program Revitalisasi Tahun 2025

No	Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Anggaran
1	Paud	50	Rp. 14.908.040.700
2	SD	189	Rp. 137.216.010.520
3	SMP	81	Rp. 80.010.725.253
4	SMA	25	Rp. 24.894.090.000
Jumlah		345	Rp 257.028.866.743

a. Jenjang PAUD

- Jumlah penerima: 50 satuan pendidikan
- Total anggaran: Rp14.908.040.700
- Proporsi terhadap total: sekitar 14,5% dari total satuan pendidikan dan 5,8% dari total anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk PAUD masih relatif kecil, meskipun fase pendidikan usia dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kesiapan belajar anak. Kondisi ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan perhatian terhadap infrastruktur dan mutu layanan PAUD di tahun-tahun mendatang.

b. Jenjang SD

- Jumlah penerima: 189 satuan pendidikan
- Total anggaran: Rp137.216.010.520
- Proporsi terhadap total: sekitar 54,8% dari total satuan pendidikan dan 53,4% dari total anggaran.

SD menjadi jenjang dengan jumlah penerima dan alokasi anggaran terbesar, mencerminkan fokus kebijakan revitalisasi pada pendidikan dasar yang menjangkau populasi peserta didik paling luas. Peningkatan sarana, fasilitas belajar, dan lingkungan sekolah di jenjang SD diharapkan memperkuat capaian *wajib belajar 13 tahun*.

c. Jenjang SMP

- Jumlah penerima: 81 satuan pendidikan
- Total anggaran: Rp80.010.725.253
- Proporsi terhadap total: sekitar 23,5% dari total satuan pendidikan dan 31,1% dari total anggaran.

Meskipun jumlah penerima lebih sedikit dibanding SD, alokasi dana per satuan pendidikan SMP cukup tinggi, menandakan adanya kebutuhan peningkatan mutu dan rehabilitasi fasilitas di jenjang menengah pertama, yang penting untuk mendukung transisi dari SD ke SMP dan mengurangi angka putus sekolah.

d. Jenjang SMA

- Jumlah penerima: 25 satuan pendidikan
- Total anggaran: Rp24.894.090.000
- Proporsi terhadap total: sekitar 7,2% dari total satuan pendidikan dan 9,7% dari total anggaran.

Alokasi untuk SMA relatif lebih kecil baik dari sisi jumlah maupun anggaran, kemungkinan karena sebagian besar kewenangan pengelolaan SMA berada di pemerintah provinsi, serta prioritas utama program revitalisasi lebih diarahkan pada pendidikan dasar.

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa poin strategis yang dapat menjadi dasar perumusan arah kebijakan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Optimalisasi dukungan teknis revitalisasi agar seluruh satuan pendidikan penerima dapat mencapai indikator keberhasilan sesuai standar nasional pendidikan.
2. Peningkatan perhatian terhadap PAUD melalui perencanaan revitalisasi bertahap untuk memperkuat kesiapan belajar anak sejak dini.
3. Pendampingan implementasi revitalisasi di SD dan SMP untuk memastikan keterpaduan dengan program *Wajar 13 Tahun* dan penguatan literasi-numerasi.
4. Sinergi lintas jenjang dan lintas sektor guna memastikan keberlanjutan hasil revitalisasi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Program revitalisasi tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama pada jenjang SD dan SMP. Meski demikian, pemerataan dukungan terhadap PAUD dan SMA juga perlu diperkuat, agar peningkatan mutu pendidikan berjalan berkesinambungan dari usia dini hingga menengah atas.

Tabel 1. 13 Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi menurut Jenjang Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Jenjang Pendidikan				Total Data
		Paud	SD	SMP	SMA	
1	Banggai	3	7	13	10	33
2	Banggai Kepulauan	1	4	3	3	11
3	Banggai Laut	2	8	2	0	12
4	Buol	1	7	3	2	13
5	Donggala	4	68	13	1	86
6	Morowali	1	7	8	1	17
7	Morowali Utara	7	14	1	1	23
8	Parigi Moutong	5	16	8	1	30
9	Poso	17	30	4	0	51
10	Sigi	0	2	1	1	4
11	Tojo Una - Una	2	7	3	2	14
12	Toli - toli	2	14	15	1	32
13	Palu	5	5	7	2	19
						345

Berdasarkan Tabel 1.13, jumlah satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun ajaran 2025/2026 tersebar di berbagai jenjang pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kabupaten Donggala menjadi penerima bantuan terbanyak dengan total 86 satuan pendidikan, didominasi oleh jenjang SD sebanyak 68 sekolah. Kabupaten Poso juga menonjol dengan 51 satuan pendidikan, terutama pada jenjang SD dan PAUD. Sebaliknya, Kabupaten Sigi memiliki jumlah penerima bantuan paling sedikit, yaitu hanya 4 satuan pendidikan, yang terdiri dari 2 SD, 1 SMP, dan tidak ada PAUD maupun SMA. Hal ini

menunjukkan adanya ketimpangan distribusi bantuan antar wilayah yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebutuhan infrastruktur dan kondisi pendidikan masing-masing daerah.

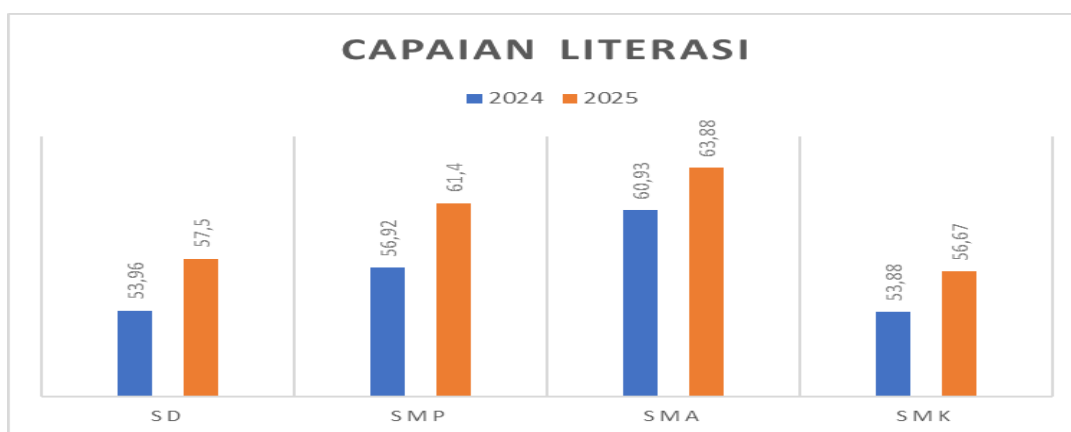
Secara keseluruhan, total satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi di Sulawesi Tengah berjumlah 345 unit. Jenjang SD menjadi yang paling dominan dalam penerimaan bantuan di hampir semua kabupaten/kota, menandakan fokus utama pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan dasar. Kota Palu sebagai ibu kota provinsi menerima bantuan untuk 19 satuan pendidikan, dengan distribusi yang relatif merata di semua jenjang. Data ini memberikan gambaran penting mengenai prioritas pembangunan pendidikan di daerah, serta menunjukkan upaya pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan melalui program revitalisasi.

1.1.1 Kualitas Pendidikan

Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mempelajari berbagai pengetahuan dengan mudah. Capaian literasi dan numerasi dapat dievaluasi melalui asesmen nasional. Asesmen Nasional (AN) merupakan instrumen utama dalam mengukur mutu pendidikan secara nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen.

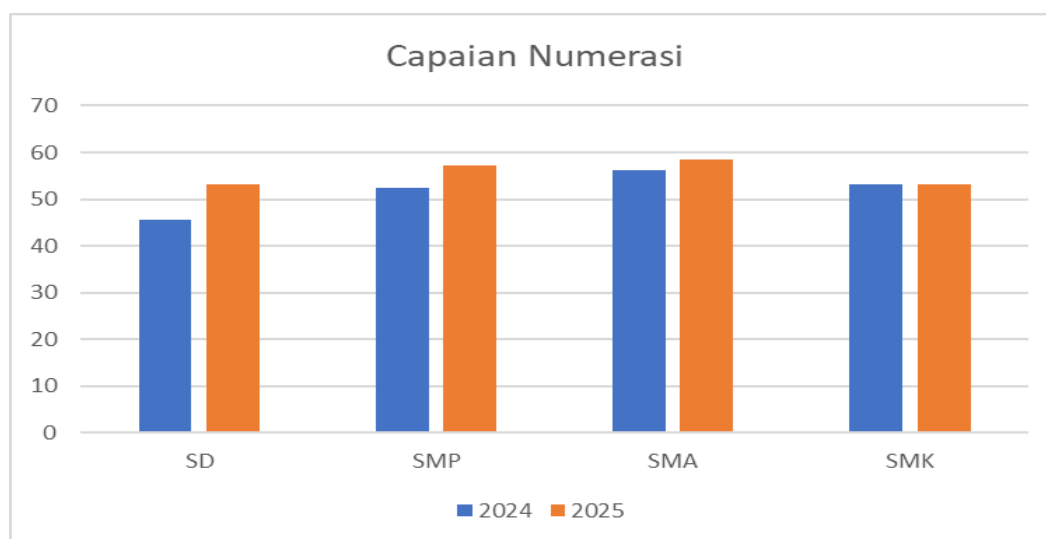
Literasi dalam konteks AKM adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Adapun capaian literasi per jenjang 2 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut.



Gambar 1. 5 Capaian Literasi Antarjenjang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025

Capaian literasi dari tahun 2024 ke 2025 mengalami peningkatan pada jenjang semua jenjang. Meskipun telah mengalami peningkatan secara rerata, namun masih cukup banyak satuan pendidikan yang capaiannya masih rendah. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan.

Numerasi adalah kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada domain bilangan, aljabar, geometri serta data dan ketidakpastian Berdasarkan hasil Asesmen Nasional dalam dua tahun terakhir, capaian numerasi di Provinsi Sulawesi Tengah masih menunjukkan variasi antar jenjang pendidikan dan kabupaten/kota. Capaian numerasi per jenjang dua tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.6 berikut.



Gambar 1. 6 Capaian Numerasi Antarjenjang di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025

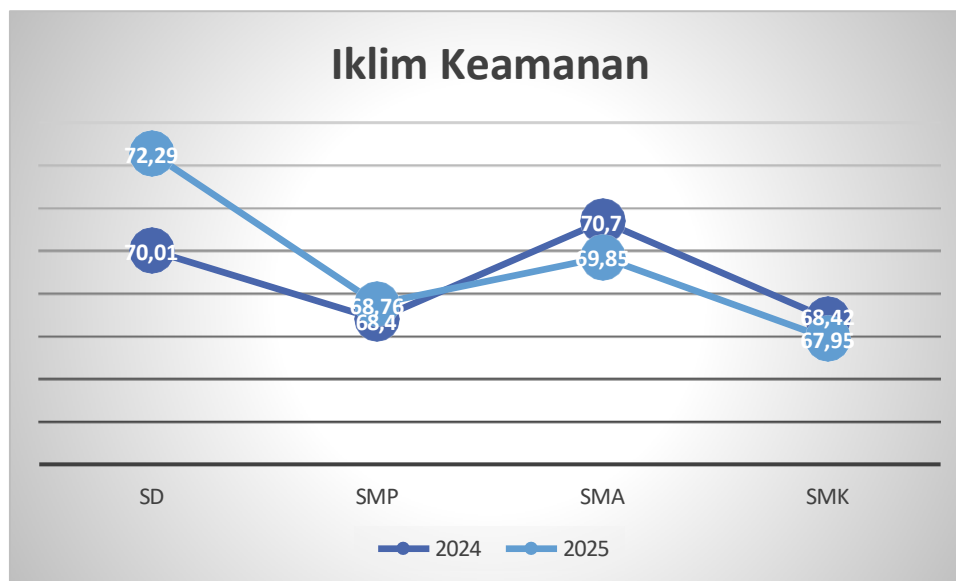
Capaian numerasi dari tahun 2024 ke 2025 mengalami peningkatan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu pada jenjang SMK mengalami sedikit penurunan. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan.

Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik

termasuk ke dalam keamanan psikis. Dalam Rapor Pendidikan, terdapat beberapa indikator penilaian yang berhubungan dengan lingkungan belajar di sekolah, yang terdiri dari Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

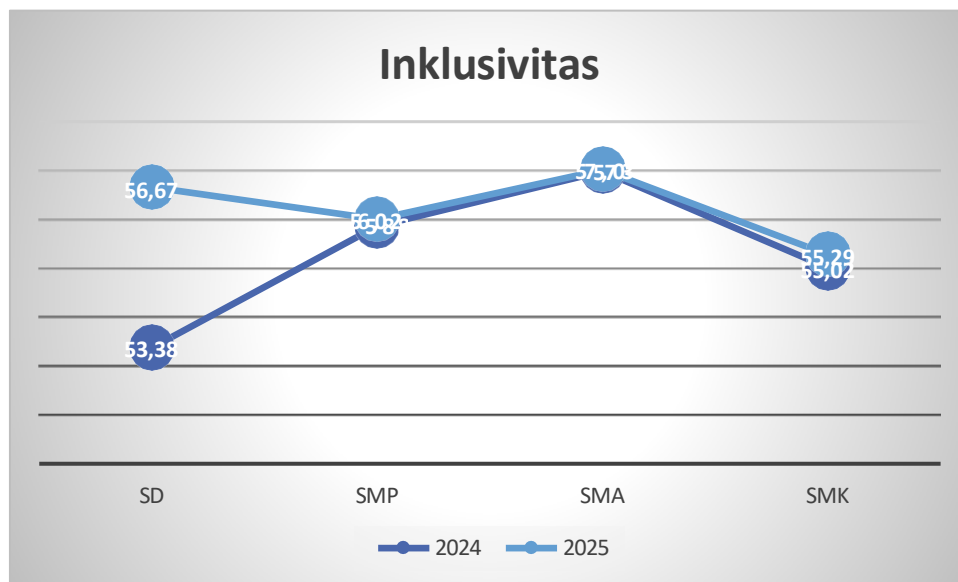
Iklim Keamanan Sekolah merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai iklim keamanan satuan pendidikan, yaitu indikator kesejahteraan psikologi peserta didik, indikator kesejahteraan psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual, dan indikator narkoba. Adapun capaian iklim keamanan satuan pendidikan per jenjang terlihat pada gambar 1.7 berikut.



Gambar 1. 7 Hasil Capaian Iklim Keamanan
Sumber: Rapor Pendidikan 2024-2025

Gambar 1.7 di atas memperlihatkan hasil capaian Iklim Keamanan Sekolah berdasarkan data Asesmen Nasional. Dari tahun 2024 hingga 2025, Iklim Keamanan Sekolah pada jenjang SD meningkat, sementara pada jenjang SMP, SMA dan SMK cenderung menurun. Capaian iklim keamanan perlu menjadi prioritas untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan keamanan sekolah yang nyaman dan aman bagi mereka dalam mengikuti pembelajaran.

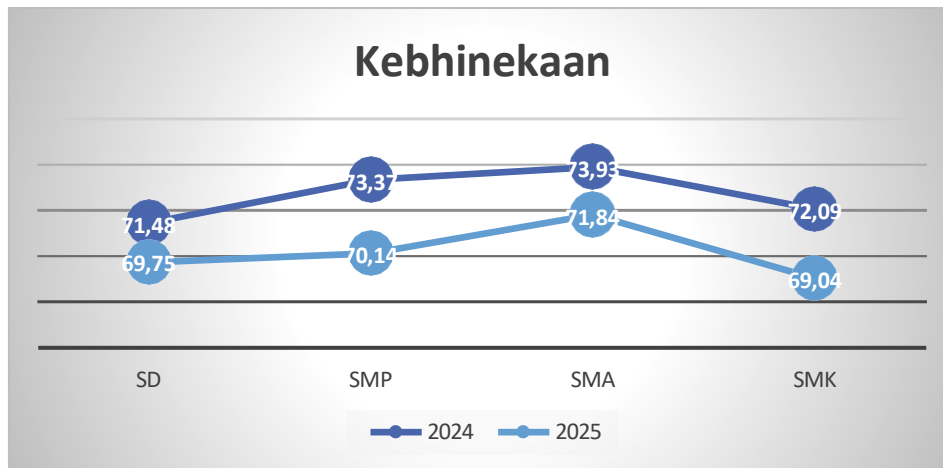
Iklm Kebhinekaan Sekolah adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya toleransi beragama, berbudaya, dan komitmen berkebangsaan. Lingkungan sekolah yang toleran dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaik tanpa perlu khawatir mengalami diskriminasi karena adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Adapun capaian iklim inklusivitas per jenjang 2 tahun terakhir terlihat pada gambar 1.8 berikut.



Gambar 1. 8 Hasil Capaian Inklusivitas
Sumber: Rapor Pendidikan 2024-2025

Capaian iklim inklusivitas pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK terjadi peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan yang signifikan terjadi pada jenjang SD, dari 53,38 menjadi 56,67.

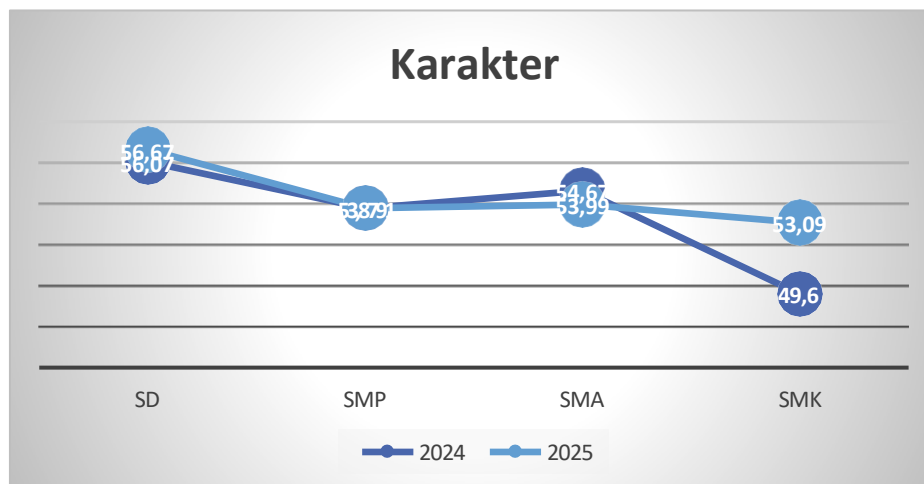
Iklm Kebhinekaan adalah lingkungan dalam satuan pendidikan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang siswa. Iklim ini mencerminkan bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan mereka. Adapun capaian iklim kebhinekaan per jenjang terlihat pada gambar 1.9 berikut.



Gambar 1. 9 Hasil Capaian Iklim Kebhinekaan Sekolah
 Sumber: Rapor Pendidikan 2024-2025

Capaian iklim kebhinekaan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan kinerja satuan pendidikan terkait iklim kebhinekaan ini perlu menjadi perhatian karena kebhinekaan menunjukkan keberterimaan seluruh warga satuan pendidikan atas latar belakang yang berbeda-beda untuk menyamakan seluruh warga.

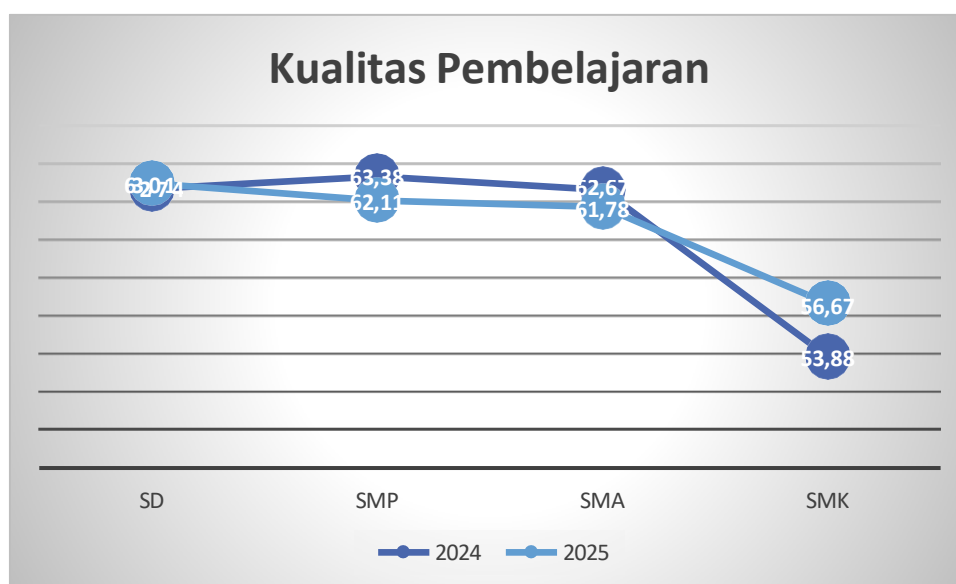
Capaian karakter adalah salah satu bentuk output dari proses pendidikan yang terangkum dalam enam profil pelajar pancasila. Profil Pelajar Pancasila tersebut terdiri atas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; berkebhinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Keenam dimensi ini bertujuan untuk membentuk pelajar yang berkarakter Pancasila secara utuh. Adapun capaian karakter terlihat pada gambar 1.10 berikut.



Gambar 1. 10 Hasil Capaian Skor Karakter
 Sumber: Rapor Pendidikan 2024-2025

Berdasarkan data pada rapor pendidikan, capaian karakter pada semua jenjang mengalami peningkatan meskipun peningkatannya belum signifikan, kecuali pada jenjang SMA. Capaian tertinggi pada jenjang SD. Dengan kondisi capaian yang menurun, perlu strategi inovatif untuk implementasi profil untuk mewujudkan karakter.

Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun capaian kualitas pembelajaran per jenjang 2 tahun terakhir terlihat pada gambar 1.11 berikut.



Gambar 1. 11 Hasil Capaian Kualitas Pembelajaran
Sumber: Rapor Pendidikan, 2024-2025

Capaian kualitas pembelajaran per jenjang 2 tahun terakhir mengalami penurunan pada jenjang SD dan SMK, sementara pada jenjang SMP dan SMA mengalami penurunan. Capaian kualitas pembelajaran ini berbanding lurus dengan capaian literasi dan numerasi

Kualitas Layanan Pendidikan 1 (Satu) Tahun Prasekolah

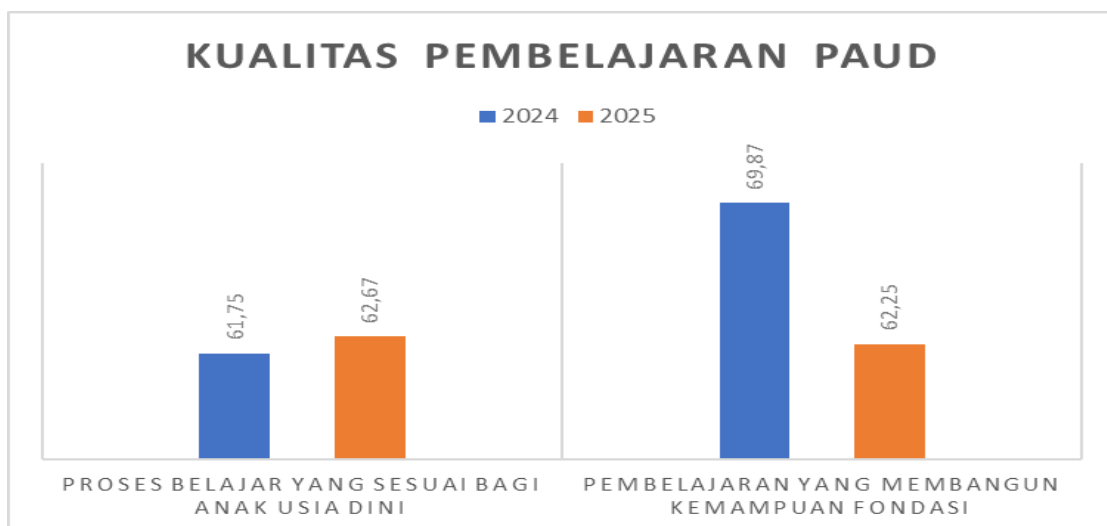
Pemahaman mengenai layanan pendidikan yang perlu diterima anak usia dini di PAUD masih perlu ditingkatkan. Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah merupakan inisiatif penting dan merefleksikan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap anak usia 5 (lima)-6 (enam) tahun dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terorganisir sebelum masuk ke jenjang

pendidikan dasar, sehingga lebih siap bersekolah secara holistik. Penerapan Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah sebaiknya dilakukan di saat ekosistem layanan sudah menguat.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu anak mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sebelum memasuki pendidikan dasar. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang, terutama bagi anak-anak. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika layanan PAUD memiliki kualitas yang baik. PAUD dengan kualitas kurang baik justru dapat memberikan dampak negatif, menimbulkan stres pada anak, yang bahkan dapat menyebabkan trauma terhadap proses belajar (Britto dkk., 2011). Ini bertentangan dengan tujuan PAUD yang seharusnya membangun pandangan positif anak terhadap pembelajaran.

Proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini adalah upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif melalui pemberian motivasi atas usaha yang dihasilkan anak serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini.

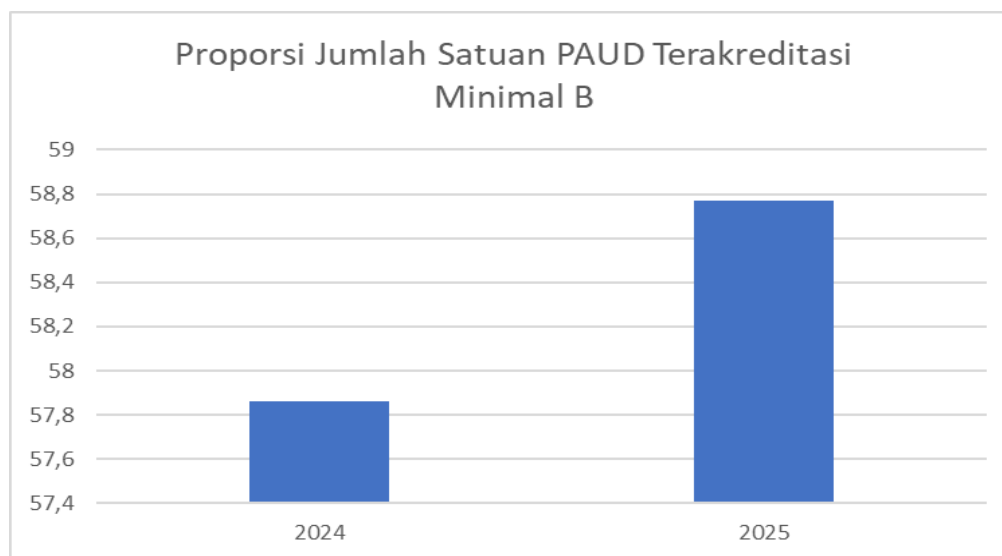
Selain itu, Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi merupakan Pembelajaran yang membangun nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh anak usia dini. Nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang dibangun merujuk pada kebijakan mengenai kompetensi yang perlu dibangun melalui pendidikan anak usia dini.



*Gambar 1. 12 Satuan PAUD berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran
Sumber: Rapor Pendidikan, 2025*

Dari data rapor pendidikan 2025, Capaian Proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini mengalami kenaikan ke arah positif, akan tetapi Capaian Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi mengalami penurunan.

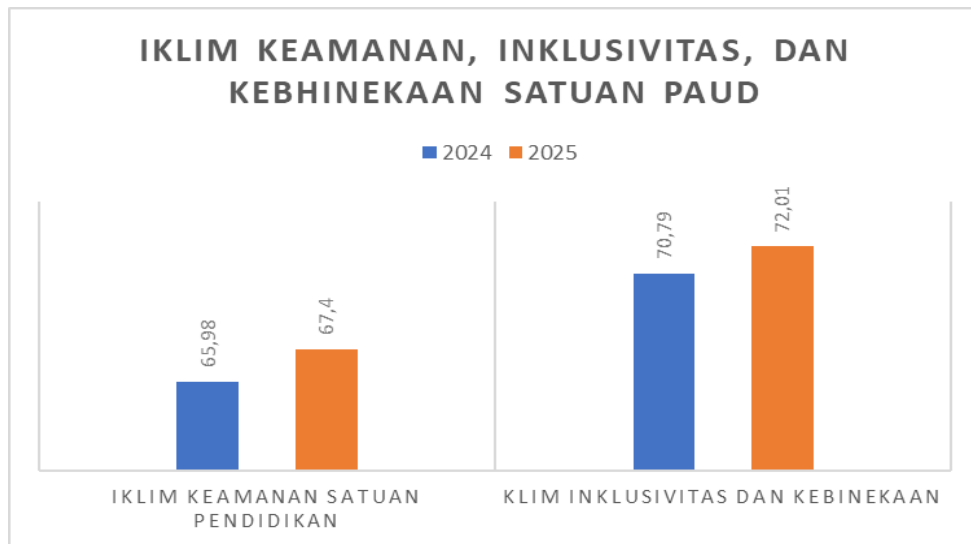
Kualitas PAUD dapat dilihat juga dari status akreditasi. Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1. 13 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2024 dan 2025
Sumber: Rapor Pendidikan 2025

Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen. Data pada rapor pendidikan 2025 menyatakan proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 berada pada kategori sedang.

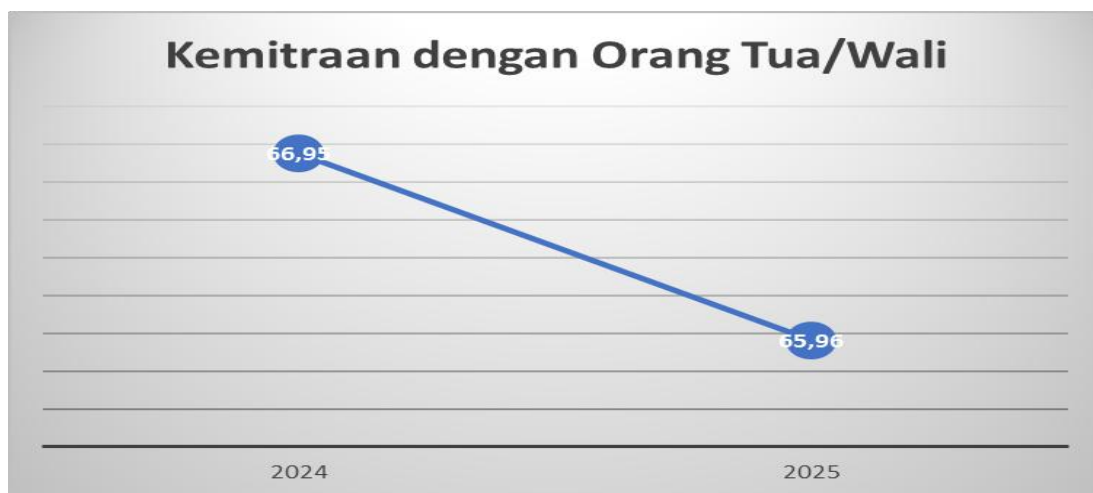
Iklim Keamanan merupakan pengelolaan lingkungan belajar yang memastikan terjaganya keamanan peserta didik baik secara fisik dan psikis, serta keselamatan peserta didik saat berkegiatan di lingkungan belajar. Sedangkan Iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan merupakan Pengelolaan yang mampu menghadirkan iklim lingkungan belajar yang inklusif yang dapat mengakomodir keragaman latar belakang warga sekolahnya serta memfasilitasi ragam kebutuhan belajar anak.



Gambar 1. 14 Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sataun PAUD Tahun 2024 dan 2025
 Sumber: Rapor Pendidikan 2025

Dari diagram diatas diperoleh bahwa Capaian iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan mengalami kenaikan.

Selanjutnya, hal lain yang menentukan kualitas pengelolaan satuan PAUD adalah Kemampuan satuan PAUD untuk menempatkan orang tua/wali sebagai mitra sehingga terbentuk kesinambungan antara stimulasi yang diberikan di satuan PAUD dengan stimulasi yang diberikan di rumah.



Gambar 1. 15 Kemitraan dengan Orang Tua/Wali pada Sataun PAUD Tahun 2024 dan 2025
 Sumber: Rapor Pendidikan 2025

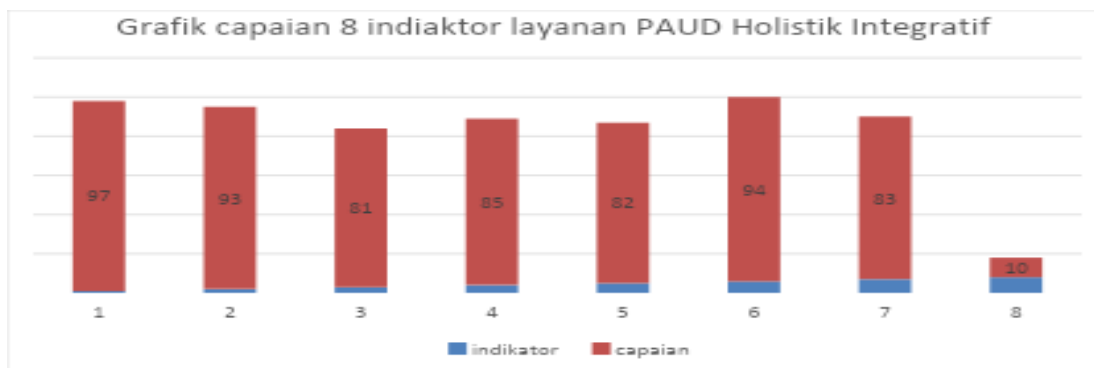
Dari diagram diatas diperoleh bahwa Capaian Kemitraan dengan Orang Tua/Wali mengalami penurunan.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Kebijakan PAUD HI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menegaskan bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini maka perlu diselenggarakannya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dengan melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Dalam mengukur pemenuhan layanan PAUD HI digunakan 8 (delapan) indikator antara lain kemitraan dengan orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, pemenuhan gizi dan kesehatan anak, perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian makanan bergizi atau makanan tambahan, pemantauan terhadap kepemilikan identitas anak, serta memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai.

Jumlah PAUD di Sulawesi Tengah 3.292 dari jumlah tersebut terdapat 20% sudah melaksanakan layanan PAUD Holistik integratif sebesar 659 lembaga. Implementasi delapan indikator layanan PAUD HI dilakukan secara bertahap, berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh BPMP Sulawesi Tengah. Maka capaian setiap indikator dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 1. 16 Grafik Capaian 8 Indikator Layanan PAUD Holistik Integratif

Berdasarkan grafik diatas maka capaian setiap indikator adalah sebagai berikut: (1) kemitraan dengan orang tua 97%, (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah lembaga yang melaksanakan layanan masih terdapat 3% yang belum maksimal melaksanakan kemitraan dengan orang tua; (2) pemantauan pertumbuhan anak, 93%, (sembilan puluh tiga persen) masih terdapat 7% lembaga yang melaksanakan layanan PAUD HI yang belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan rutinitas setiap tiga bulan mengecek pertumbuhan fisik seperti tinggi badan berat badan; (3) pemantauan perkembangan anak 81% (delapan puluh satu persen) masih terdapat 19 % lembaga yang belum melaksanakan pemantauan secara rutin aspek perkembangan seperti peningkatan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial) yang lebih kompleks; (4) pemenuhan gizi dan kesehatan anak, 85% (delapan puluh lima persen) masih terdapat 15% yang belum terdata melaksanakan pemenuhan gizi aktivitas pemenuhan gizi pada anak usia dini meliputi pemberian makanan bergizi seimbang yang bervariasi (buah, sayur, protein), membiasakan sarapan, memberikan susu formula, serta menjaga asupan air putih dan membatasi makanan manis/berlemak; (5) perilaku hidup bersih dan sehat 82% (delapan dua persen); (6) pemberian makanan bergizi atau makanan tambahan 94% (sembilan puluh empat persen) masih terdapat 6% (enam persen) lembaga yang belum melaksanakan Pola hidup sehat dan bersih merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh dengan tubuh yang kuat, pikiran yang segar, dan lingkungan yang nyaman. Melalui pembiasaan sehari-hari, anak dapat belajar merawat diri dan lingkungannya dengan cara yang menyenangkan; (7) pemantauan terhadap kepemilikan identitas anak 83% (delapan puluh tiga persen) masih terdapat 17% (tujuh belas persen) lembaga yang belum maksimal mengadakan kegiatan pendataan, seperti: mengisi formulir identitas anak pada awal tahun ajaran (nama, tanggal lahir, NIK, status akte, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga (KK) dan memberi penjelasan kepada orang tua tentang pentingnya identitas anak dan prosedur pembuatan dokumen; (8) memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai 10% (sepuluh persen), masih terdapat 90 persen lembaga yang tersedia sanitasi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan di Indonesia adalah proses multifaset yang mengubah cara penyelenggaraan pembelajaran, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan nasional. Transformasi ini mencakup penyediaan infrastruktur (perangkat, jaringan), pengembangan platform pembelajaran (seperti Rumah Belajar dan platform terpadu yang lebih baru: Rumah Pendidikan), program peningkatan kapabilitas guru, serta kebijakan pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan. Periode 2019–2025 menandai percepatan digitalisasi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 — yang memaksa sekolah, guru, dan siswa beralih cepat ke pembelajaran daring — dan dilanjutkan oleh inisiatif pemerintah yang lebih sistematis untuk memasukkan teknologi ke dalam kurikulum dan fasilitas sekolah. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan: penetrasi internet nasional meningkat signifikan, inisiatif skala besar diumumkan untuk menjangkau ratusan ribu sekolah, dan lembaga pusat mengintegrasikan layanan digital pendidikan. Namun, kemajuan tersebut juga mengungkapkan masalah struktural: akses perangkat dan komputer di banyak sekolah masih rendah; infrastruktur listrik dan internet tidak merata; kapasitas guru belum merata; dan ada risiko simbolisasi (perangkat tanpa pendampingan) bila kebijakan tidak disertai intervensi holistik. Upaya digitalisasi pendidikan di Indonesia sebenarnya dimulai lebih awal dengan berbagai program pilot: penyediaan laboratorium komputer di sekolah tertentu, program e-learning terbatas, dan proyek kerjasama internasional untuk membangun kapasitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Fase ini bersifat sporadis, bergantung pada alokasi dana proyek, peran donor, dan inisiatif daerah—belum ada skala nasional yang komprehensif. Seiring meningkatnya akses internet global dan penurunan biaya perangkat, pemerintah mulai memasukkan aspek TIK ke dalam strategi pendidikan. Kurikulum nomor kebijakan memasukkan literasi digital sebagai komponen penting, dan Kemdikbud (sebelum menjadi Kemendikbudristek) mendorong platform seperti Rumah Belajar sebagai sumber belajar daring untuk guru dan siswa. Pengembangan kemampuan guru mulai mendapatkan perhatian melalui pelatihan TIK.

Pandemi COVID-19 adalah pemicu percepatan terbesar digitalisasi pendidikan di Indonesia. Sekolah ditutup dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi norma sementara. Pemerintah, sekolah, penyedia platform edtech, dan masyarakat bergerak cepat: konten daring diproduksi masif, Rumah Belajar menjadi salah satu sumber resmi yang diperluas, dan banyak guru memodifikasi metode mengajar untuk daring. Namun fase ini juga menampakkan

ketimpangan akses: anak-anak di daerah tanpa internet atau perangkat praktis tertinggal. Setelah fase darurat, pemerintah mulai merencanakan program yang lebih sistematis: integrasi data (Dapodik dan sistem lain), pengembangan portal terpadu, serta program peningkatan infrastruktur sekolah (DAK Fisik, BOS, program TIK sekolah). Pada 2025, inisiatif terpusat seperti peluncuran Rumah Pendidikan (super-aplikasi/pusat layanan digital pendidikan) menandai upaya memperkuat ekosistem digital secara nasional, mengintegrasikan layanan, konten, dan manajemen pembelajaran.

Angka penetrasi internet di Indonesia tumbuh pesat; survei APJII 2024 mencatat penetrasi sekitar 79,5% pengguna internet dari total populasi, yang membuka peluang akses konten pendidikan digital bagi kebanyakan penduduk. Namun statistik nasional seperti ini menyamakan kesenjangan: wilayah perkotaan jauh lebih terhubung dibandingkan daerah terpencil maupun pulau terluar. Peningkatan indeks TIK nasional (BPS: Indeks Pembangunan TIK 2024 mencapai 6,02 dari skala 0–10) menunjukkan perbaikan infrastruktur secara makro, tetapi tantangan konektivitas masih nyata pada level sekolah. Data BPS dan analisis lain menunjukkan fenomena penting: proporsi sekolah dengan akses komputer tidak tinggi dan pada beberapa jenjang bahkan menurun pasca-pandemi. Laporan menyebutkan proporsi sekolah dengan akses komputer di jenjang SD rendah (sekitar 5% pada 2022 dalam beberapa dataset), yang menandakan bahwa kepemilikan perangkat di sekolah masih sangat terbatas. Artinya, walau banyak siswa memiliki ponsel, lingkungan sekolah formal seringkali tidak memiliki sarana yang memadai untuk pembelajaran digital terstruktur. Kondisi ini menuntut kebijakan untuk penyediaan perangkat (laptop, tablet, IFP/layar interaktif) dan perawatan jangka panjang.

Memasuki 2024–2025, pemerintah mengumumkan program skala besar untuk digitalisasi pembelajaran yang mencakup pengadaan perangkat dan layar interaktif (Interactive Flat Panel) ke ribuan sekolah. Target-target fiskal dan distribusi diumumkan sebagai bagian dari rencana pemerataan; pada 2025 ada pernyataan resmi mengenai program yang menysasar ratusan ribu sekolah sebagai tahap awal distribusi perangkat pembelajaran digital. Program ini dirancang agar setiap sekolah memiliki media untuk menyampaikan materi terstandar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelengkapan tenaga pendamping, listrik, dan jaringan internet di setiap lokasi.

Rumah Belajar adalah salah satu inisiatif pusat yang dibangun sebagai Learning Management System (LMS) publik, menyediakan sumber belajar beragam (video, bank soal,

laboratorium maya, kelas maya) yang gratis untuk guru dan siswa. Keberadaannya memberi dasar platform publik untuk konten pembelajaran yang bisa diakses tanpa biaya konten. Namun tantangannya: seberapa luas platform ini dipakai di sekolah yang tidak memiliki perangkat memadai atau akses internet stabil?

Pada awal 2025, Kemendikdasmen meluncurkan atau mengumumkan Rumah Pendidikan sebuah upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital (konten, data, manajemen, fitur kolaborasi). Rumah Pendidikan dimaksudkan sebagai peta jalan transformasi digital: menggabungkan sumber daya, ruang kolaborasi, dan layanan administrasi pendidikan dalam satu portal terpadu untuk siswa, guru, orang tua, dan pemda. Upaya ini merefleksikan pemahaman bahwa pembangunan platform tidak cukup, yang diperlukan adalah interoperabilitas layanan, kemudahan akses, dan konsistensi konten berkualitas. Selain inisiatif pemerintah, berkembang pula ekosistem perusahaan edtech lokal dan internasional yang menyediakan layanan bimbingan belajar daring, platform manajemen kelas, dan konten interaktif berbayar. Kolaborasi publik-swasta menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan perangkat, konten berkualitas, dan pelatihan guru. Namun perlu kebijakan yang memastikan konten komersial tetap terjangkau dan dapat melengkapi — bukan menggantikan — layanan publik gratis.

Digitalisasi pendidikan dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan: regulasi kurikulum (yang memasukkan literasi digital), juknis DAK TIK, kebijakan BOS yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan TIK, serta peraturan pusat mengenai standar infrastruktur sekolah. Pemerintah pusat sejak 2024–2025 memperkuat arahan kepada pemerintah daerah agar melakukan sinkronisasi data, memetakan kebutuhan, dan menyiapkan rencana pelaksanaan digitalisasi berbasis data Dapodik. Data dan kebijakan yang konsisten menjadi syarat agar bantuan tepat sasaran. Sumber pendanaan program digitalisasi berasal dari beberapa kanal: alokasi APBN (program nasional), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk infrastruktur, dana BOS untuk pemeliharaan (terbatas), serta dukungan CSR dari dunia usaha. Skema pendanaan ini harus dirancang agar tidak hanya pembelian perangkat, tetapi juga pemeliharaan, upgrade, pelatihan guru, dan konektivitas berkelanjutan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengadaan perangkat satu kali tanpa rencana pemeliharaan mengakibatkan perangkat cepat rusak dan tidak terpakai.

Suksesnya digitalisasi mensyaratkan integrasi data lintas instansi: Dapodik (pendidikan), Dukcapil (identitas), data sosial (untuk jalur afirmasi), serta data penyedia layanan telekomunikasi (ketersediaan jaringan). Koordinasi ini memerlukan protokol keamanan data, kebijakan privasi, dan tata kelola yang jelas agar data digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Peran guru adalah determinan kunci dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Banyak guru yang telah belajar cepat selama pandemi, mengadopsi metode sinkron dan asinkron, membuat materi multimedia, dan menilai secara digital. Namun skala dan kedalaman kompetensi belum merata: sebagian guru masih kesulitan adaptasi teknologi, ada yang belum mendapat pelatihan pedagogi digital yang memadai, dan masih ada kebutuhan pelatihan berkelanjutan (lahirnya literasi digital pedagogis — bukan sekadar literasi perangkat). Pelatihan guru harus mencakup desain pembelajaran daring/hybrid, penilaian digital, keamanan siber, dan pemanfaatan konten terbuka. Transformasi digital memungkinkan berbagai model: full online (cocok untuk pembelajaran jarak jauh), blended/hybrid (kombinasi tatap muka dan daring), serta pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan sumber digital untuk riset dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka mendorong pengalaman belajar lebih kontekstual; digitalisasi dapat menjadi fasilitator asalkan infrastrukturnya tersedia dan guru mampu memfasilitasi proses. Sekolah perlu mengembangkan manajemen TIK: rencana kebutuhan tahunan, anggaran pemeliharaan, keamanan perangkat, serta peran teknisi sekolah (bisa berbentuk tenaga fokus atau gabungan). Tanpa tata kelola yang baik, perangkat dan platform tidak akan dipakai optimal. Ini termasuk juga strategi penyimpanan konten lokal (untuk area dengan akses internet terbatas) dan konten offline yang bisa diakses tanpa koneksi terus-menerus.

Ketimpangan akses: Sekolah tanpa komputer dan jaringan tetap tertinggal; perangkat yang dibagikan belum menjangkau semua sekolah. Data menunjukkan proporsi sekolah dengan komputer sangat rendah di beberapa jenjang. Masalah teknis dan pemeliharaan: Perangkat kadang rusak tanpa rencana perbaikan; listrik atau jaringan tidak stabil. Kualitas konten dan kesesuaian lokal: Tidak semua konten digital relevan secara kontekstual untuk daerah tertentu; adaptasi lokal seringkali diperlukan. Risiko komersialisasi: Ketergantungan pada layanan berbayar berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan jika sekolah/ortu tidak mampu membiayai.

Berdasarkan instruksi presiden no 7 tahun 2025 Program Revitalisasi dan Percepatan Digitalisasi Pembelajaran maka salah satu program kementerian pendidikan dasar dan menengah yaitu pemberian bantuan alat pembelajaran kepada satuan satuan pendidikan yang memenuhi indikator, alat tersebut bertujuan untuk mempercepat satuan pendidikan dalam pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran.

Rekap data Penerima bantuan peralatan interaktif flat panel (IFP) Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Penerima bantuan peralatan interaktif flat panel (IFP) Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	PAUD I	PAUD II	SD	SMP	SMA	SMP	Kesetaraan	Jumlah
1	Banggai	59	17	364	113	34	113	0	700
2	Banggai Kepulauan	0	16	164	61	18	61	0	320
3	Kab. Banggai Laut	20	7	82	37	7	37	1	191
4	Kab. Buol	30	4	158	64	12	64	0	332
5	Kab. Donggala	114	45	357	99	19	99	2	735
6	Kab. Morowali	49	7	154	37	9	37	3	296
7	Kab. Morowali Utara	45	20	153	49	11	49	1	328
8	Kab. Parigi Moutong	135	70	425	115	29	52	1	827
9	Kab. Poso	12	7	234	75	19	115	0	462
10	Kab. Sigi	24	4	268	69	21	75	3	464
11	Kab. Tojo Una-Una	21	9	186	52	14	69	2	353
12	Kab. Tolitoli	17	5	230	68	16	52	1	389
13	Kota Palu	87	6	180	52	31	68	2	426
	Jumlah	613	217	2955	891	240	891	16	5823

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah bantuan digitalisasi pembelajaran berupa interaktif flat panel sejumlah 5.823 yang tersebar di 13 kabupaten kota dan semua jenjang, jumlah setiap jenjang dapat dilihat secara rinci pada tabel... Smart Board atau IFP merupakan papan interaktif digital yang menggabungkan fungsi layar sentuh, proyektor, dan komputer dalam satu perangkat, sehingga memudahkan guru dalam menyajikan pembelajaran visual, interaktif, dan berbasis teknologi informasi.

Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah: (1) Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi (2) Mewujudkan transformasi digital di satuan pendidikan, (3) Meningkatkan interaktivitas pembelajaran, dan (4) Menumbuhkan literasi digital bagi guru dan siswa.

Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah gizi masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2024 sekitar 8,53 persen anak Indonesia masih mengalami ketidakcukupan gizi. Kondisi ini memengaruhi kemampuan belajar siswa, konsentrasi, kesehatan, dan capaian pendidikan. Selain itu, ada kesenjangan akses gizi antara wilayah; beberapa daerah memiliki fasilitas dan kemampuan pendampingan yang tinggi, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan pelayanan gizi, baik dari sisi distribusi makanan sehat maupun ketersediaan sumber nutrisi. Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa sekolah adalah salah satu tempat strategis untuk menjangkau banyak anak sekaligus dalam pemenuhan gizi harian.

Program makan bergizi gratis (MBG) muncul sebagai intervensi yang diharapkan bisa merespons secara langsung isu gizi dan mengurangi beban orang tua, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain fungsi gizi, MBG juga diwacanakan untuk turut membentuk karakter: kebersihan, etika makan, tidak membuang makanan (anti-mubazir), serta kebiasaan makan yang baik secara sosial. Pada awalnya, program ini bekerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana di sekolah-sekolah. Titik awal peluncuran dilakukan di 190 titik SPPG yang tersebar di 26 provinsi. Rencana ekspansinya cukup agresif: pada akhir Januari 2025 direncanakan diperluas ke sekitar 943 titik SPPG di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat pelaksanaan, pemerintah membangun kerjasama antar lembaga: antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Badan

Gizi Nasional. Program ini juga mendapat dukungan dari organisasi internasional seperti UNICEF. Selanjutnya, di Bogor (11 Februari 2025), diluncurkan Center of Excellence MBG (CoE MBG), yang bertujuan menjadi pusat penelitian, inovasi, pelatihan, dan pengembangan pedoman pelaksanaan program. Buku Rekomendasi Penyelenggaraan MBG, pedoman standar gizi, prosedur operasional baku, sistem pemantauan dan evaluasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah termasuk bagian dari output CoE tersebut.

Sebanyak 770 ribu anak menjadi penerima manfaat MBG hingga 15 Februari 2025, dan diperkirakan meningkat menjadi 1 juta anak pada akhir bulan Februari. Angka target nanti ditetapkan lebih tinggi: presiden berharap bahwa pada akhir Juli 2025, minimal 6 juta anak sudah menikmati program ini.

Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan makanan. Aspek non-gizi juga diangkat: pembentukan karakter (misalnya kebersihan, etika makan, menghindari perilaku mubazir), serta penguatan layanan kesehatan pendukung. Kemitraan juga makin diperkuat, antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang menegaskan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pemantauan program ini.

Meskipun keberhasilan-awal sudah terlihat, banyak sorotan dan tantangan yang muncul: Regulasi, pedoman, dan sosialisasi: Ada kekhawatiran bahwa petunjuk teknis, prosedur operasional baku, dan pedoman belum sepenuhnya tersosialisasi ke semua SPPG maupun pihak sekolah/pelaksana di lapangan. Manajemen dan keamanan pangan: Salah satu isu penting adalah jaminan keamanan pangan—bagaimana makanan dipersiapkan, disimpan, disajikan agar tetap higienis. Kehigienisan dapur, kualitas bahan baku, dan prosedur pengolahan menjadi perhatian utama.

Tantangan distribusi dan logistik: Menyediakan makanan bergizi gratis secara merata ke banyak titik SPPG di berbagai provinsi, termasuk daerah terpencil, memerlukan pengaturan logistik yang baik: penyimpanan, bahan baku lokal, tenaga pendukung, dan kontrol kualitas.

Anggaran dan keberlanjutan: Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Estimasi pemerintah menyebutkan bahwa program ini ditargetkan menjangkau 19,47 juta orang dengan anggaran sekitar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa dana itu tersedia, digunakan secara efisien, dan dipertahankan di tahun-

tahun berikutnya. Evaluasi dan pemantauan: CoE dan MoU dengan Badan Gizi Nasional menetapkan bahwa harus ada sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Namun, bagaimana data di lapangan dikumpulkan, diverifikasi, dan digunakan untuk perbaikan masih dalam tahap pengembangan. Komitmen multisektoral dan kolaborasi lokal: Implementasi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, sekolah, komite sekolah, penyedia makanan lokal, tenaga kesehatan sekolah, dan masyarakat. Sinergi ini bisa menjadi tantangan karena variasi kapasitas antar daerah.

Program MBG diharapkan memiliki dampak yang luas dan memiliki efek positif jangka panjang:

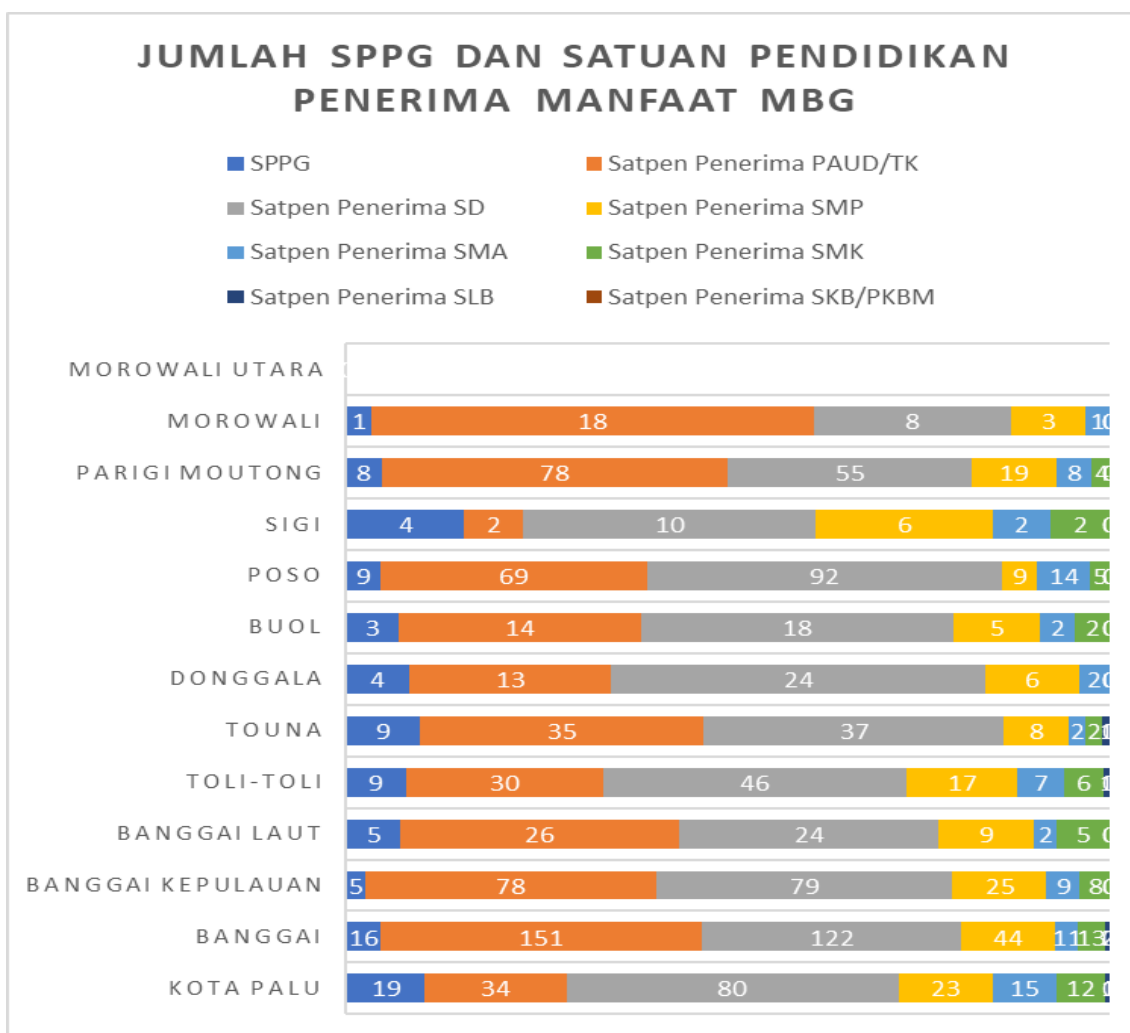
- Peningkatan status gizi siswa, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi absensi, meningkatkan fokus belajar, dan hasil akademik.
- Pengurangan beban ekonomi bagi orang tua, terutama keluarga kurang mampu, karena tidak perlu menyediakan bekal setiap hari.
- Pembentukan kebiasaan makan sehat dan karakter yang baik: kebersihan, etika makan, rasa syukur, disiplin, dan menghindari pemborosan makanan.
- Efek multiplier: Pengadaan makanan bisa melibatkan UMKM lokal, penyedia bahan baku lokal, dan memperkuat industri pangan lokal. Juga membuka peluang penelitian dan inovasi (melalui CoE) untuk menciptakan menu bergizi yang adaptif secara lokal.

Penyempurnaan regulasi dan sistem pemantauan agar keamanan pangan, keadilan distribusi, kualitas makanan, dan penggunaan anggaran dapat terjaga. Dalam jangka menengah dan panjang, program ini bisa menjadi pilar dalam kebijakan pembangunan SDM unggul di Indonesia, membantu pemerintah mencapai target-target kesehatan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam visi Indonesia Emas 2045.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis dan signifikan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Sejak peluncuran pada awal 2025, program ini telah menunjukkan kemajuan nyata: jaringan titik layanan semakin meluas, jumlah penerima manfaat terus bertambah, dan regulasi serta kerangka pendukung mulai dibentuk dengan lebih matang melalui Center of Excellence dan pedoman pelaksanaan. Namun agar manfaatnya maksimal, dibutuhkan perhatian khusus terhadap keamanan pangan, distribusi logistik, sosialisasi dan pelatihan bagi pelaksana di

lapangan, serta jaminan keberlanjutan dana. Komitmen multisektoral antara Kemendikdasmen, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dunia kesehatan, dan masyarakat sangatlah penting. Dengan pengelolaan yang baik dan evaluasi yang terus menerus, MBG memiliki potensi besar menjadi salah satu kebijakan unggulan dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter.

Pelaksanaan Program MBG di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai pada tanggal 13 Januari 2025, dimana pada awal pelaksanaan Jumlah Satuan Pendidikan penerima manfaat sejumlah 21 Satuan Pendidikan dengan total jumlah siswa penerima manfaat 6.667 siswa di 2 SPPG yang sudah beroperasi. Berikut data Satuan Pendidikan dan Penerima Manfaat dan Jumlah SPPG yang sudah beroperasi .

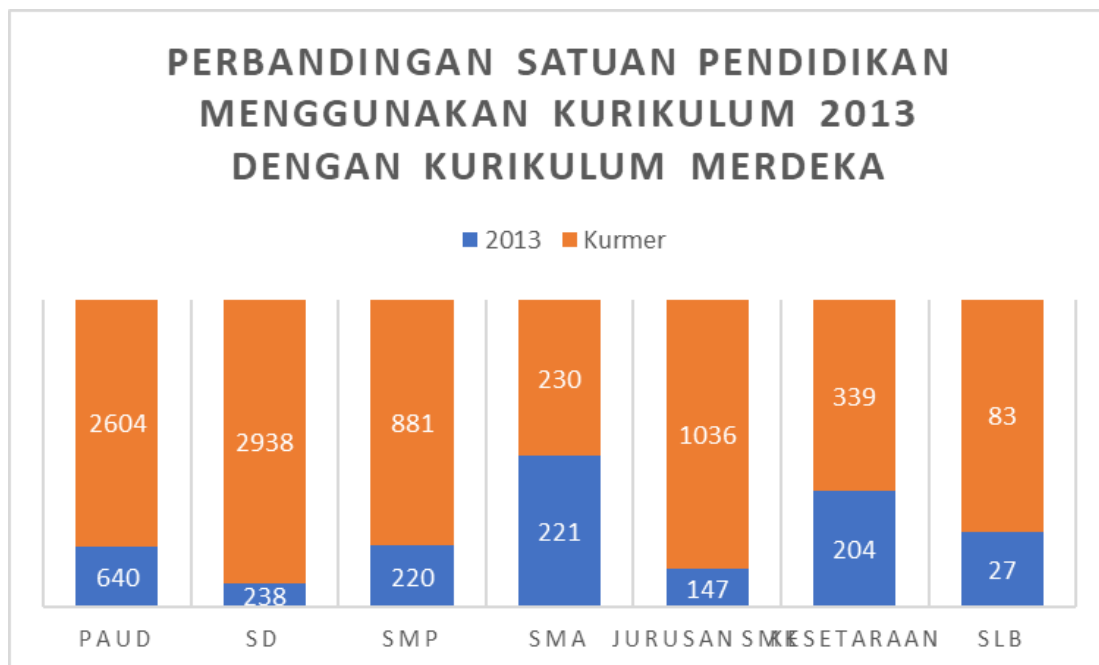


Gambar 1. 17 Data SPPG dan Satuan Pendidikan Penerima Manfaat
Sumber: Data Grup WA BPMP, SPPG, dan Dinas Pendidikan 13 Oktober 2025

Dari 13 Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 1 kabupaten yang belum menerima manfaat MBG, yaitu Kab. Morowali Utara.

Penerapan Kurikulum Nasional

Perubahan kurikulum adalah suatu hal yang mutlak. Sebelum kurikulum nasional, satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum 2013. Perubahan tersebut untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, serta mengatasi tantangan di era digital. Kurikulum tersebut bertujuan agar siswa dapat belajar lebih mendalam sesuai minat dan bakatnya, mengembangkan karakter dan keterampilan hidup, serta menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan masa depan. Pada tahun 2025, kurikulum nasional diimplementasikan menggunakan pendekatan baru, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Adapun satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum nasional dibandingkan yang masih menggunakan kurikulum 2013 terlihat pada gambar 1.18 berikut.



Gambar 1. 18 Perbandingan Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka

Sumber: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2025, 13 Oktober 2025

Berdasarkan data pokok pendidikan, masih banyak satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan berbagai alasan, antara lain (1) guru-guru belum dilatih untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru; (2) terbatasnya sarana-prasarana yang dibutuhkan saat implementasi, (3) peserta didik belum semuanya siap menghadapi pembelajaran yang fleksibel dan mandiri. Kurikulum nasional perlu diterapkan karena memiliki beberapa keunggulan yang menjadi solusi dari berbagai tantangan pendidikan saat ini. Kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Selain itu, Kurikulum Nasional memberikan kebebasan lebih besar baik bagi peserta didik, guru, maupun sekolah dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan juga lebih relevan dan interaktif, seperti berbasis proyek, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta menumbuhkan karakter Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga mendorong pengembangan kompetensi guru agar lebih kreatif dan inovatif, serta memberi fleksibilitas kepada sekolah dalam menyesuaikan sistem pembelajarannya dengan kondisi masing-masing. Untuk proses dan hasil belajar yang lebih baik, semua satuan pendidikan pada semua jenjang secara bertahap perlu menerapkan kurikulum nasional.

Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu adalah suatu sistem dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap layanan Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu terdiri atas; penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah proses sistematis, terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pendidikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Siklus penjaminan mutu meliputi; penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan mutu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penjaminan mutu eksternal adalah proses evaluasi, akreditasi dan pengawasan mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga di luar satuan pendidikan.

Indikator suatu satuan pendidikan sudah menerapkan penjaminan mutu pendidikan, yaitu: (1) mengikuti asesmen nasional, (2) mengakses rapor pendidikan, (3) mengunduh rapor pendidikan, (4) mengalokasikan anggaran sesuai capaian rapor pendidikan minimal 50% indikator merah, minimal 30% indikator kuning dan minimal 1 kegiatan pada indikator hijau, (5) mengalami perbaikan indikator capaian rapor pendidikan 2024 ke rapor pendidikan 2025 (capaian 2023 dan capaian 2024)

Berdasarkan indikator ini, maka capaian satuan pendidikan sudah menerapkan penjaminan mutu pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 15 Jumlah Satuan Pendidikan yang Memenuhi Indikator Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

No	Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan	IK-1 Jml	IK-2 Jml	IK-3 Jml	IK-4 Jml	IK-5 Jml	IK-6 Jml
1	PAUD	3356,0	3040,0	2432,0	2400,0	403,0	552,0	69,0
2	SD	2956,0	2914,0	2898,0	2893,0	286,0	1221,0	201,0
3	SMP	893,0	875,0	868,0	867,0	89,0	308,0	54,0
4	SMA	240,0	232,0	231,0	229,0	47,0	93,0	22,0

Sumber data: Dasbord PMP, diakses tanggal 13 Oktober 2025, pukul 09.53

Keterangan:

IK-1: mengikuti asesmen nasional

IK-2: mengakses rapor Pendidikan

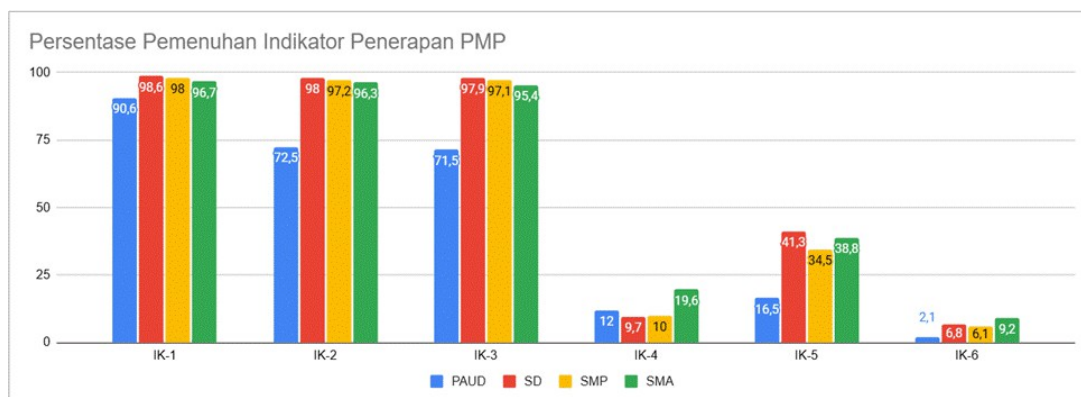
IK-3: mengunduh rapor Pendidikan

IK-4: mengalokasikan anggaran

IK-5: perbaikan indicator capaian rapor Pendidikan

IK-6: sudah Menerapkan penjaminan mutu Pendidikan

Persentase jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi indikator penerapan penjaminan mutu pendidikan terlihat pada gambar 1.19 berikut.



Gambar 1. 19 Persentase Pemenuhan Indikator Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan

Satuan pendidikan yang mengikuti asesmen nasional merupakan indikator pertama untuk menentukan apakah satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu pendidikan. Asesmen nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan dalam rangka mengukur program yang sudah terlaksana baik dan program yang belum berjalan dengan baik. Tabel 1.2.1 dan gambar 2.3 pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dijelaskan dari 3356 satuan Pendidikan PAUD, 2956 SD, 893 SMP dan 240 SMA, sudah ada 3040 (90,58%) PAUD yang sudah mengikuti asesmen nasional, 2914 (98,57%) SD, 875 (97,98%) SMP dan 232 (96,67%) SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada satuan pendidikan PAUD,SD,SMP dan SMA yang belum mengikuti asesmen nasional, sehingga sekolah tersebut belum memiliki rapor pendidikan. Hal tersebut berdampak pada belum adanya sumber utama data dalam perencanaan peningkatan mutu. Diharapkan tahun 2026 semua satuan Pendidikan mengikuti asesmen nasional. Presentase satuan pendidikan yang sudah mengikuti asesmen nasional adalah SD dan yang terendah adalah PAUD.

Satuan Pendidikan mengakses rapor Pendidikan merupakan indikator penerapan penjaminan mutu Pendidikan yang menunjukkan satuan Pendidikan sudah mulai memanfaatkan rapor Pendidikan sebagai sumber utama data dalam perencanaan. Berdasarkan data pada Tabel 1.2.1 dan gambar 2.3, presentasi satuan Pendidikan yang tertinggi mengakses rapor Pendidikan adalah sekolah dasar (SD) dan yang terendah adalah PAUD dengan persentase 72,47%.

Satuan Pendidikan mengunduh rapor Pendidikan merupakan indikator ketiga yang menunjukkan suatu sekolah sudah Menerapkan penjaminan mutu Pendidikan. Berdasarkan data pada tabel 1.2.1 dan gambar 2.3, satuan Pendidikan yang terendah mengunduh rapor Pendidikan adalah PAUD dengan presentasi 71,51% dan yang tertinggi SD dengan presentasi 97,87%

Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu Pendidikan merupakan indikator keempat satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu Pendidikan. Berdasarkan tabel 1.2.1 dan gambar 2.3, satuan pendidikan yang tertinggi adalah SMA dengan presentasi 19,58 dan terendah SD dengan presentasi 9,68

Satuan Pendidikan mengalami perbaikan capaian rapor Pendidikan merupakan indikator kelima yang harus dipenuhi setiap satuan Pendidikan. Untuk dapat dikategorikan sebagai satuan Pendidikan yang sudah menerapkan penjaminan mutu Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2.1 dan gambar 2.3. Berdasarkan hal tersebut maka satuan Pendidikan SD yang memiliki persentase yang mengalami perbaikan capaian rapor Pendidikan yang tertinggi dengan presentasi 41,31 dan capaian terendah adalah PAUD dengan persentase 16,50.

Satuan Pendidikan yang sudah menerapkan penjaminan mutu pendidikan merupakan satuan pendidikan yang sudah menerapkan 5 indikator penerapan penjaminan mutu Pendidikan. Berdasarkan tabel 1.2.1 dan gambar 2.3, satuan pendidikan yang tertinggi capaian penerapan penjaminan mutunya adalah SMA dengan persentase 9,17 dan satuan Pendidikan yang terendah capaian penerapan penjaminan mutu pendidikannya adalah SD dengan persentase 2,06.

Berdasarkan tabel 1.2.1 dan gambar 2.3, kolom IK-4 dan IK-5 dapat disimpulkan bahwa persentase satuan Pendidikan yang mengalami perbaikan capaian rapor Pendidikan lebih tinggi dari presentasi satuan Pendidikan yang mengalokasikan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perbaikan rapor Pendidikan ditentukan oleh program kegiatan setiap satuan Pendidikan yang ada dalam rencana kerja tahunan, artinya program kegiatan yang berbiaya maupun program kegiatan yang tidak berbiaya, sedangkan pengalokasian anggaran hanya menghitung program kegiatan yang ada dalam rencana kerja dan anggaran sekolah.

Untuk meningkatkan satuan Pendidikan Menerapkan penjaminan mutu Pendidikan tahun 2025, maka perlu dilaksanakan beberapa kegiatan:

- 1) Pendampingan sistem penjaminan mutu Pendidikan bagi semua pengawas satuan Pendidikan
- 2) Advokasi pemda dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025
- 3) Pendampingan sistem penjaminan mutu bagi 28 satuan Pendidikan yang rendah capaian rapor Pendidikan tahun 2024.

Pembiayaan Pendidikan

Dalam memastikan pendidikan bermutu bagi semua, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1)). Untuk itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan kecukupan pembiayaan, terutama dalam rangka mencapai layanan pendidikan dengan mutu terbaik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dana Transfer ke Daerah

Sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan.

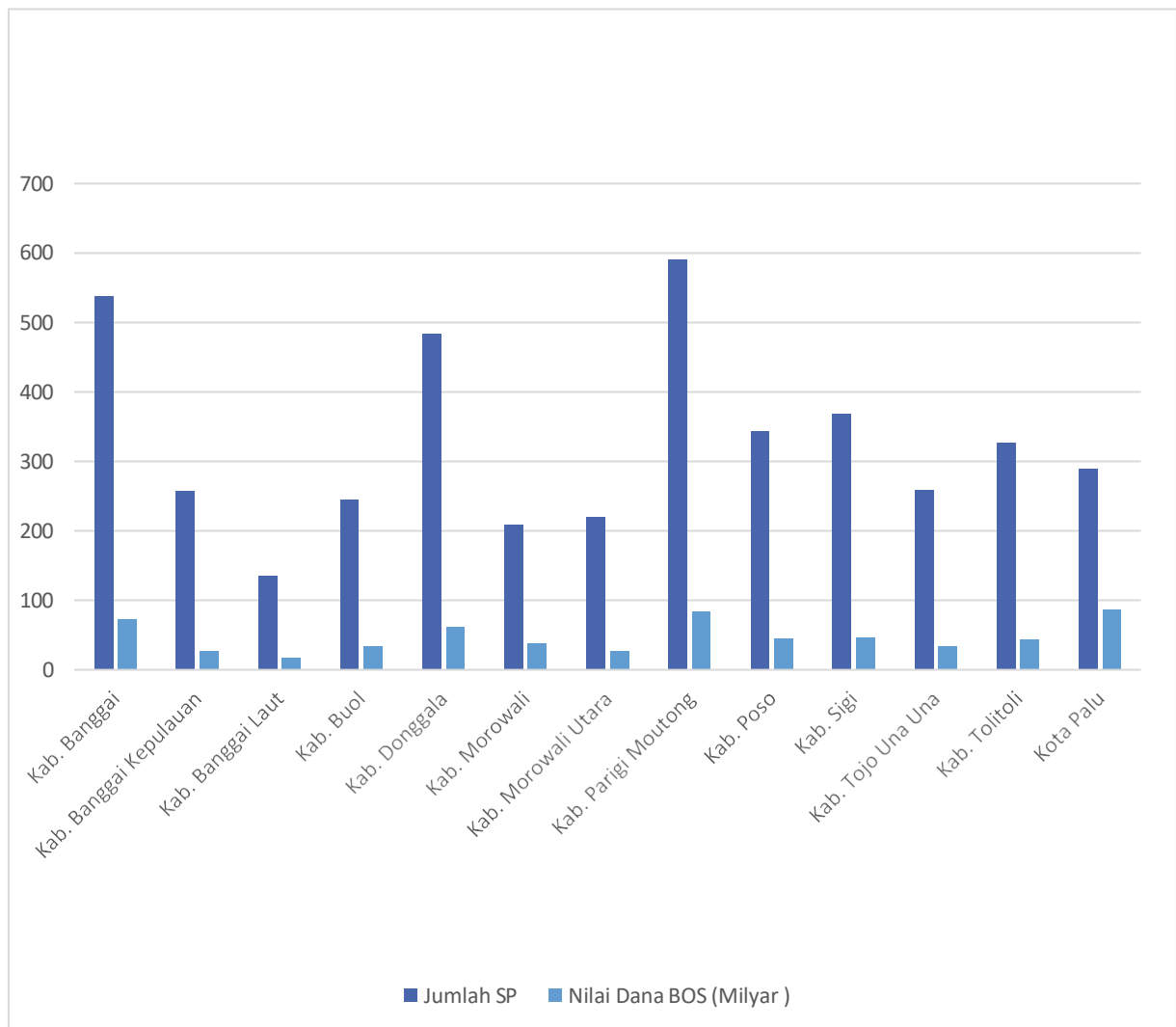
Transfer Pendidikan Daerah

Berikut adalah ringkasan poin-poin penting terkait Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Sulawesi Tengah tahun 2024, yang di dalamnya termasuk alokasi untuk sektor pendidikan:

1. Total Alokasi TKD Sulteng 2024:
 - Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota di dalamnya pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan ditetapkan mencapai sekitar Rp 26 triliun (berdasarkan penyerahan DIPA dan TKD 2024).
 - Realisasi TKD Sulteng tahun 2024 dilaporkan mencapai Rp 17,04 triliun.
2. Komponen TKD yang Relevan dengan Pendidikan: Anggaran pendidikan di daerah sebagian besar didanai melalui komponen Dana Transfer Khusus (DTK) dalam TKD. Beberapa komponen utama yang terkait dengan pendidikan, terutama yang termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, meliputi:
 - Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Terdiri dari Dana BOS (untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB), Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.
 - Terdapat kenaikan alokasi Dana BOSP secara nasional (dan berdampak ke daerah, termasuk Sulteng) di tahun 2024 yang disebabkan oleh kenaikan jumlah peserta didik.
 - Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil):
 - Alokasi untuk TPG dan TKG ASN Daerah (Tunjangan Khusus Guru) meningkat karena memperhitungkan kenaikan gaji ASN.
 - Namun, terdapat penurunan DAK Nonfisik pada pos Tambahan Penghasilan (Tamsil).
3. Anggaran Pendidikan Provinsi (APBD 2024):
 - Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk APBD 2024, tercatat bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar sekitar Rp 3,087 triliun. Angka ini merupakan bagian dari total Pendapatan Daerah Provinsi yang digunakan untuk mendanai Belanja Daerah, termasuk di dalamnya untuk operasional Dinas Pendidikan.

Untuk mengetahui detail alokasi per jenis transfer (misalnya, berapa spesifik alokasi Dana BOS untuk Sulteng tahun 2024), perlu merujuk pada Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Dokumen tersebut memberikan rincian angka per jenis transfer dan per kabupaten/kota.

Penerimaan Dana Bos Reguler di satuan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 1. 20 Penerimaan Dana Bos Reguler di satuan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 1. 16 Penerimaan Dana Bos Reguler di satuan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Kab/Kota	Jumlah SP	Nilai Dana BOS (Milyar)
Kab. Banggai	538	73.14
Kab. Banggai Kepulauan	258	27.33
Kab. Banggai Laut	135	17.78
Kab. Buol	245	33.44
Kab. Donggala	484	62.61
Kab. Morowali	209	38.92
Kab. Morowali Utara	220	27.48
Kab. Parigi Moutong	591	83.51
Kab. Poso	344	45.01
Kab. Sigi	369	46.09
Kab. Tojo Una Una	259	33.61
Kab. Tolitoli	327	42.75
Kota Palu	290	86.47

Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

Pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sulawesi Tengah diukur berdasarkan Data Rapor Pendidikan Kab/Kota yang merupakan hasil Asesmen Nasional (AN) satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selama periode tahun 2020 - 2024 hasil analisis Asesmen Nasional melalui data rapor pendidikan telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 1.17 Capaian kinerja penjaminan mutu pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Sasaran Kegiatan (SK-1) Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada semua jenjang pendidikan</i>				
IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (Scorecard) minimal 75	26,5 %	27,26%	27,4%	30,20%
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	4,5%	5%	6,21%
IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95%	91,54%	95,2%	97,97%

Sumber : Rapor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2021

Tabel 1.17 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase satuan Pendidikan yang memiliki kinerja sekolah minimal 75 dari tahun 2020 sebesar 27,26% menjadi 30,20% pada Tahun 2021 (IKK 1.1). Sementara itu, capaian kinerja yang kedua (IKK 1.2) menunjukkan bahwa persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter menunjukkan kesenjangan yang rendah pada tahun 2020 sebesar 4,5% namun semakin meningkat pada 2021 sebesar 6,21%. Dengan kata lain, hasil AKM dan survei karakter pada sekolah dengan kinerja terbaik dan terburuk kesenjanganannya fluktuatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah belum merata pada kurun waktu 2020-2021.

Disisi lain, Data Pokok Pendidikan sebagai bagian dari data yang dianalisis untuk penjaminan mutu Pendidikan, menunjukkan kualitas data yang semakin meningkat dalam kurun waktu 2020-2021. Hal ini dapat ditunjukkan oleh capaian IKK 1.3 bahwa pada tahun 2021 seluruh kab/kota memiliki data pokok Pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.

Tabel 1. 18 Capaian kinerja penjaminan mutu pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Sasaran Kegiatan (SK-1) Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen</i>						
IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran	0,98%	3,31%	1,96%	2,76%	3,92%	10,68%
IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25%	75%	30%	50%	55%	100%

Sumber : Rapor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2024

Berdasarkan Gambar 2, hasil pengukuran capaian kinerja yang bersumber dari Rapor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022–2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada indikator-indikator yang berkaitan dengan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam periode Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Tengah 2022–2024 adalah meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar (Dikdas), dan pendidikan menengah (Dikmen). Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan dua indikator kinerja utama (IKK), yaitu persentase satuan pendidikan yang meningkat mutu pembelajarannya serta persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pada rapor pendidikan.

Untuk IKK 1.1, yaitu persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, capaian menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target peningkatan mutu satuan pendidikan sebesar 0,98%, sementara realisasinya mencapai 3,31%. Tahun berikutnya, target yang ditetapkan meningkat menjadi 1,96% dan capaian riil mencapai 2,76%. Selanjutnya, pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 3,92% dan berhasil direalisasikan secara luar biasa hingga mencapai 10,68%. Angka ini menunjukkan lonjakan capaian yang jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, menandakan efektivitas program peningkatan mutu yang dilaksanakan BPMP Sulawesi Tengah.

Sementara itu, IKK 1.2 yang mengukur persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan rapor pendidikan (untuk jenjang Dikdas dan Dikmen) juga menunjukkan kemajuan yang stabil. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi mencapai 75%. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi 30% dan capaian berada di angka 50%. Sedangkan pada tahun 2024, target sebesar 55% berhasil direalisasikan sepenuhnya hingga mencapai 100%. Pencapaian ini menggambarkan keberhasilan BPMP Sulawesi Tengah dalam mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menggunakan hasil rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu di masing-masing wilayah.

Berdasarkan hasil asesmen nasional tersebut menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang fokus kepada kegiatan yang dapat mendorong serta mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2020 – 2024 sebagaimana berikut.

Tabel 1. 19 Program dan Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

Tahun Anggaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2020	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Rp 25.090.504.000,-	98,04 %
2021	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 18.716.504.000,-	97,67 %
2022	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 19.781.129.000,-	99,77 %
2023	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 26.967.268.000,-	96,29 %
2024	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 37.639.111.000,-	98,30 %

Sumber : Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2024

1.1.1 Tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi melalui peningkatan pelaksanaan SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui peningkatan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) selama periode Renstra 2020 - 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 1. 20 Capaian kinerja tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Sasaran Kegiatan (SK-2) Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik</i>				
IKK 2.1 Predikat SAKIP	76%	80,12%	81%	81,82%
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81%	97,02%	82%	95,11%

Sumber : Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020–2021 pada sasaran kegiatan Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik, terlihat peningkatan kinerja yang konsisten. Untuk indikator IKK 2.1, yaitu Predikat SAKIP, capaian meningkat dari target 76% menjadi realisasi 80,12% pada tahun 2020, dan kembali naik dari target 81% menjadi 81,82% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin efektif dan transparan. Sementara itu, IKK 2.2, yaitu Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL, juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2020, target 81% berhasil dilampaui dengan realisasi 97,02%, dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 95,11% dari target 82%. Capaian ini menggambarkan efektivitas pengelolaan anggaran LPMP yang efisien, akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Tabel 1. 21 Capaian kinerja tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Sasaran Kegiatan (SK-2) Terwujudnya Tata Kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang baik</i>						
IKK 2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	A	A (82,45)	A	A(89,10)	A	A(90,00)
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	83	98,12	85	96,18	96,20%	97,78%

Sumber : Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Pencapaian indikator tersebut mencerminkan keberhasilan BPMP dalam memperkuat sistem manajemen kinerja dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kinerja SAKIP yang meningkat menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan hasil kerja telah berjalan semakin baik serta terintegrasi dengan sasaran strategis organisasi. Begitu pula dengan nilai kinerja anggaran yang tinggi menandakan bahwa realisasi program dan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari pengawasan internal yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola. Secara keseluruhan, hasil capaian tersebut memperlihatkan bahwa BPMP telah menunjukkan kinerja yang unggul dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil kinerja pembangunan pendidikan.

Berdasarkan data capaian kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022–2024 pada sasaran kegiatan Terwujudnya Tata Kelola BPMP yang Baik, terlihat bahwa indikator tata kelola lembaga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pada IKK 2.1, yaitu Predikat

SAKIP, BPMP Sulawesi Tengah secara konsisten memperoleh nilai “A” selama tiga tahun berturut-turut, dengan peningkatan skor dari 82,45 pada tahun 2022, menjadi 89,10 pada tahun 2023, dan mencapai 90,00 pada tahun 2024. Capaian ini menandakan meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi hasil.

Sementara itu, IKK 2.2 yang mengukur Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan masing-masing tahun berhasil terlampaui, yaitu dari 83% target dengan realisasi 98,12% pada tahun 2022, meningkat menjadi 96,18% pada tahun 2023, dan mencapai 97,78% pada tahun 2024. Hasil ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan anggaran yang efisien dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, capaian kedua indikator ini mencerminkan bahwa BPMP Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

Rata-rata capaian kinerja SAKIP dan NKA BPMP Provinsi Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya dan tergolong baik. Capaian predikat SAKIP meningkat dari predikat BB pada tahun 2020 menjadi predikat A (2021—2024). Demikian pula dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang selalu melebihi target selama lima tahun berturut-turut, dimana capaian tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan nilai NKA sebesar 98,12. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik, dan berkomitmen untuk terus mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja SAKIP dan NKA sebagai bagian dari indikator kinerja Rencana Strategis 2025 - 2029.

1.1.5 Inovasi

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa inovasi yang dapat menunjang keterlaksanaan capaian kinerja serta memberikan kesempatan kepada pengguna jasa layanan untuk mengakses berbagai informasi dan layanan umum yang disediakan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Inovasi tersebut antara lain:

1. SIPINTAS (Sistim Informasi Peminjaman Fasilitas), aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat luas yang bermaksud meminjam/memanfaatkan fasilitas (BMN) BPMP Provinsi Sulawesi Tengah tanpa harus datang langsung dan tagihan juga dilakukan secara online sehingga transparansi keuangan terjamin.
2. SIMARPEN (Sistim Informasi Monitoring dan Akses Raport Pendidikan), aplikasi ini memberi kemudahan bagi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Pengawas satuan pendidikan Se Provinsi Sulawesi Tengah untuk memantau dan mendorong satuan pendidikan untuk mengakses dan memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun RKT/ARKAS. Kemudahan ini berdampak pada percepatan akses Rapor Pendidikan dan Penyusunan RKT/ARKAS yang berkualitas.
3. Jumat Belajar (Wadah berbagi ilmu), dengan adanya Jumat Belajar memudahkan masyarakat luas menambah ilmu dan mengakses informasi terkini seputar pendidikan melalui media daring (Webinar). Webinar ini diselenggarakan 2 kali sebulan setiap hari Jumat minggu I dan III.
4. BESTI (Bersama Saling memfasilitasi), Program ini merupakan ajakan bermitra dengan pemerintah daerah untuk penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui paket kerjasama yang saling menguntungkan.
5. SININJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja PPNPN), adalah aplikasi untuk menilai kinerja PPNPN berbasis online oleh pendamping masing-masing.
6. KOMBEL (Komunitas Belajar Internal), adalah pertemuan rutin internal untuk berbagi ilmu dan informasi terkini dari Kemendikbudristek yang dilaksanakan dua kali sebulan setiap hari Jumat minggu II dan IV.
7. SIPAKET (Sistim Informasi Keuangan Panitia Kegiatan), adalah aplikasi untuk memudahkan penyelesaian administrasi keuangan kegiatan. Aplikasi ini telah direduplikasi oleh BGP Provinsi Sulawesi Tengah, BPMP Provinsi Bengkulu dan BAN PDM Provinsi Sulawesi Tengah.
8. SIKEMAS (Sistem Informasi Keluar Masuk), adalah aplikasi untuk memantau kedisiplinan pegawai terkait jam keluar masuk pada saat jam kantor. Risiko yang dimitigasi: Kinerja pegawai menurun, Disiplin pegawai menurun, Pelaksanaan tugas-tugas keseharian pegawai di kantor terbengkalai, Pegawai tidak ada ditempat saat dibutuhkan dan Kinerja lembaga menurun.

9. Apel Multi Arah SERASI (Solusi Efektif, Rekomendasi Antar Staf, Inovatif), merupakan apel multi arah yang dirancang untuk menciptakan ruang diskusi terbuka dan partisipatif, dimana seluruh elemen BPMP dapat menyampaikan informasi, masukan, serta mencari solusi bersama terkait berbagai isu dan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

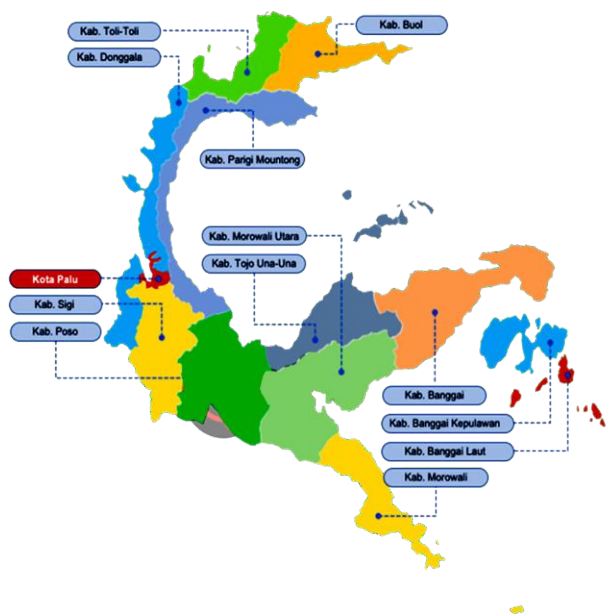
Untuk mendukung program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat sehingga berpotensi dalam mengawal serta mendukung keterlaksanaan program prioritas tersebut di Provinsi Sulawesi Tengah.

Luas Wilayah dan Posisi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ada sebelumnya.

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, dan Buol) dan 1 kota (Kota Palu) dengan ibu kota provinsi berada di Kota Palu. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada batas astronomis terletak antara 2° 22'

Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan serta 119° 22' dan 124° 22' Bujur Timur. Aksesibilitas wilayah yang semakin baik juga memungkinkan pelaksanaan program pendampingan mutu oleh BPMP dapat menjangkau satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, luas wilayah bukan semata menjadi tantangan, tetapi juga modal strategis dalam mendorong sinergi peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 1. 21 Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber data : Badan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tengah berbatasan dengan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur maritim Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menghubungkan jalur perdagangan nasional dan internasional melalui Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Kondisi ini, ditambah dengan kekayaan sumber daya alamnya, menciptakan peluang besar untuk membangun kemitraan yang kuat dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga lain. Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka memperkuat relevansi pendidikan, khususnya pada sektor pendidikan vokasi, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah satuan pendidikan yang cukup besar, mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta pendidikan nonformal. Satuan pendidikan tersebut tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan karakteristik yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan yang padat penduduk hingga wilayah perdesaan, pegunungan, pesisir, dan kepulauan.

Tabel 1. 22 Data jumlah dan sebaran sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah

Kab/Kota	KB	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	PKBM	SKB	SPS	TPA	Total
Morowali Utara	78	133	156	50	11	9	1	12	0	2	0	452
Palu	66	176	181	53	32	24	12	22	2	2	6	576
Banggai	196	222	364	114	34	26	5	19	1	0	1	982
Parigi Moutong	236	302	425	115	29	21	2	35	1	0	0	1,166
Morowali	110	137	154	41	9	10	1	7	1	7	0	477
Tojo Una Una	117	120	186	52	14	7	1	21	1	1	0	520
Sigi	79	213	270	70	21	11	2	24	1	5	1	697
Donggala	106	215	357	100	19	14	1	15	3	7	0	837
Tolitoli	59	96	230	68	16	14	1	10	1	0	0	495
Buol	7	119	158	64	12	9	2	7	1	0	0	379
Banggai Laut	29	57	82	37	7	8	1	6	1	6	0	234
Banggai Kepulauan	59	108	164	61	18	16	1	13	1	0	0	441
Poso	54	225	234	75	20	17	3	7	1	13	0	649
Total	1196	2,123	2,961	900	242	186	33	198	15	43	8	7,905

Sumber data : Dapodik Tahun 2025

Keberadaan satuan pendidikan yang luas dan relatif merata ini merupakan potensi penting dalam memperluas akses layanan pendidikan. Namun, perbedaan kualitas antar wilayah menjadi tantangan yang dapat diatasi melalui strategi peningkatan mutu yang tepat sasaran, sehingga semua peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara.

Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki guru sebanyak 57.190 dengan berbagai latar belakang kualifikasi akademik dan kompetensi. Sejalan dengan itu,

tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas, laboran, dan pustakawan juga berperan mendukung peningkatan kualitas tata kelola satuan pendidikan.

Tabel 1. 23 Data Sebaran Jumlah Tenaga Pendidik di Provinsi Sulawesi Tengah

KABUPATEN/KOTA	PAUD	SD	SKB	PKBM	SLB	SMA	SMK	SMP	TOTAL
Banggai	930	3,250	8	29	33	809	427	1,378	6,864
Banggai Kepulauan	453	1,510	1	7	6	341	231	706	3,255
Banggai Laut	322	877	0	4	7	158	140	448	1,956
Buol	329	1,510	8	8	10	304	228	881	3,278
Donggala	722	3,106	65	36	20	480	290	1,329	6,048
Morowali	640	1,941	22	34	8	249	224	608	3,726
Morowali Utara	406	1,342		20	5	236	186	560	2,755
Parigi Moutong	1,336	2,898	5	114	16	689	366	1,141	6,565
Poso	569	2,139	6	11	23	503	382	938	4,571
Sigi	829	2,595	8	113	30	462	175	924	5,136
Tojo Una Una	431	1,698	9	12	7	262	165	620	3,204
Tolitoli	426	1,870	16	35	12	339	301	801	3,800
Palu	799	2,318	11	95	99	849	732	1,129	6,032
Jumlah	8,192	27,054	159	518	276	5,681	3,847	11,463	57,190

Sumber data : Dapodik Tahun 2025

Ketersediaan sumber daya guru diperkuat dengan pendampingan, dan pembimbingan terkait implementasi kurikulum, serta pemanfaatan platform pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini menjadi potensi besar dalam meningkatkan kapasitas pendidik agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid.

Dukungan Dana Pendidikan

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjadi sumber utama pembiayaan operasional sekolah. Sebanyak 4.269 satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah menerima dana BOSP Tahun 2025. Jumlah total anggaran BOSP yang digelontorkan untuk satuan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 618.132.721.000,00.

Selain itu, tersedia pula Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan khusus untuk Tahun 2025 bantuan revitalisasi sebanyak 345 satuan pendidikan (PAUD : 50, SD : 289, SMP : 81, SMA : 25) dengan jumlah total 257.028.866.743 yang dapat digunakan untuk memperkuat sarana prasarana dan program peningkatan mutu pendidikan. Ketersediaan dana pendidikan yang rutin setiap tahun ini merupakan potensi signifikan dalam

menjamin keberlangsungan program peningkatan mutu, sepanjang didukung oleh tata kelola yang akuntabel, transparan, dan efektif.

Dukungan Program Prioritas Pemerintah

Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menetapkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah, antara lain:

1. **Revitalisasi Satuan Pendidikan** untuk meningkatkan mutu sarana prasarana, kurikulum, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.
2. **Digitalisasi Pembelajaran**, yaitu pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses belajar melalui bantuan perangkat *Interactive Flat Panel* (IFP) dan pemanfaatan platform Rumah Pendidikan
3. **Wajib Belajar 13 tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan bagi siswa usia sekolah dengan melibatkan berbagai mitra di daerah sehingga terwujud pemerataan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. **Pembelajaran dan Penilaian** yang menekankan pada penguatan pembelajaran dan penilaian kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta satuan Pendidikan melalui kegiatan pembelajaran mendalam; Coding dan Kecerdasan Artifisial; Penguatan Literasi, numerasi dan sains; serta pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik.
5. **Penjaminan Mutu Pendidikan**, merupakan upaya strategis Kemendikdasmen melalui BPMP untuk melakukan advokasi satuan Pendidikan dan pemerintah daerah dalam menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan pemetaan dan peningkatan mutu Pendidikan; mendampingi dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan mutu sesuai SNP serta mengawal pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program prioritas ini menjadi potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Daya Manusia BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu potensi penting dalam mendukung keterlaksanaan program prioritas dan program Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan diperlukan agar SDM yang tersedia dapat memberikan layanan dan manfaat secara optimal kepada masyarakat. Komitmen dan upaya BPMP Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya adalah dengan cara melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan In House Training (IHT), kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai, dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Spesifik Pegawai untuk seluruh pegawai PNS dan PPPK sebanyak 99 orang dengan rincian kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. 24 Data Jumlah Pegawai BPMP Sulawesi Tengah

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah ASN (orang)	Jumlah PPPK (orang)
SMA/SMK	11	21
Diploma	5	0
Sarjana	26	0
Magister	31	0
Doktor	5	0
Jumlah	78	21
Total	99	

Sumber data : Data Kepegawaian BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

Sarana dan Prasarana

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, perpustakaan, ruang laboratorium, ruang aula, ruang kelas, asrama, lapangan olahraga dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, jaringan internet sebagai pendukung teknologi informasi sudah menjangkau seluruh area gedung dalam rangka semakin memperkuat BPMP Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan.



Gambar 1. 22 Fasilitas Kantor BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

1.2.2. Permasalahan

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sulawesi Tengah selama selama 5 (ima) tahun berturut-turut perlahan menunjukkan kenaikan meskipun terdapat beberapa perubahan indikator capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil rapor pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2020—2024 masih terdapat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan capaian nilai literasi dan numerasi dibawah rata-rata nilai nasional, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya keterampilan guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;
- Pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk pemenuhan SPM sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan perlu dioptimalkan;
- Belum optimalnya pemahaman, kemampuan dan kesadaran satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan;
- Satuan pendidikan belum menggunakan sepenuhnya hasil rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
- Belum optimalnya penanganan satuan pendidikan yang capaian literasi dan numerasinya di bawah standar minimum;
- Pemberdayaan komunitas belajar, pengawas, perlu dioptimalkan agar berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diimplementasikan dengan baik.

Partisipasi Pendidikan

Secara umum angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat dan dapat dipertahankan. Masih terdapat berbagai masalah dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan agar dapat menunjukkan hasil yang baik. Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan angka partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal, terlihat dari persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dan APK SMA/ sederajat sebesar 88,39% (delapan puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen).
2. Belum meratanya partisipasi pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia yang ditandai dengan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota di beberapa kabupaten
3. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun yang mencapai 6,130 (enam ribu seratus tiga puluh). Jumlah ATS yang masih besar ini, dikarenakan aspek ekonomi dan sosial budaya dalam menjangkau layanan pendidikan, serta belum optimalnya pendataan, penjangkauan, pendampingan, dan penyediaan pola layanan pendidikan yang tepat bagi ATS.
4. Dukungan fasilitas pada satuan pendidikan terutama fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Kualitas Pembelajaran

Pada tahun 2024 hasil capaian kualitas pembelajaran baru menunjukkan kategori sedang. Pada beberapa jenjang nilai rerata hasil asesmen dan capaian lingkungan belajar sudah cukup. Kementerian melakukan berbagai upaya agar kualitas hasil pembelajaran terus meningkat, namun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang literasi membaca dan numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/ sederajat.
2. Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang.

3. Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional.
4. Masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi, data sampai dengan tahun 2024 hanya sekitar 62,12% (enam puluh dua koma dua belas persen) satuan PAUD yang telah terakreditasi baik (akreditasi A atau B).
5. Rendahnya angka satuan PAUD yang memenuhi standar pelaksanaan PAUD HI, hanya sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga persen) satuan PAUD saja yang sudah memenuhi 8 (delapan) indikator dalam pelaksanaan PAUD HI.
6. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata.
7. Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higienis di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pendanaan Pendidikan

Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Masih terdapat beberapa provinsi/kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD sesuai peruntukannya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sebagai berikut:

1. Perbedaan persepsi terkait kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif menyebabkan pemanfaatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran dapat terjadi.
2. Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melakukan pemenuhan saja tanpa memperhatikan ketepatan dari penggunaan anggaran tersebut.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Visi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka visi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Sulawesi Tengah”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPMP Provinsi Sulawesi, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas serta mewujudkan insan Kemdikdasmen yang SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong). Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah di bawah binaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Misi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka misi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mengacu kepada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian.

Tujuan dan indikator tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan turunan dari tujuan dan indikator tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun tujuan dan indikator tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Ditjen PAUDDasmen	Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun 	Mendukung wajib belajar 13 tahun
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> Literasi Membaca Numerasi 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

		3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	
3	Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sulawesi Tengah minimal A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sulawesi Tengah minimal A

Sasaran Kegiatan

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran kegiatan yang mengacu kepada sasaran strategis Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sasaran kegiatan yang dirumuskan tersebut adalah sasaran strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh BPMP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2029 adalah:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Sulawesi Tengah
3	Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan Sasaran kegiatan di atas, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	Indikasi Risiko
1.	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan belum memberikan keberpihakan untuk wilayah-wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah, daerah- daerah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak optimal yang menyebabkan fasilitas tidak digunakan dan tidak mendukung perluasan daya tampung. 2. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalannya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah.

2.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran. 2. Pemda tidak optimal dalam menyusun program dan anggaran kegiatan untuk penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya.
3.	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja anggaran tidak optimal karena kebijakan efisiensi anggaran (blokir anggaran) pada pelaksanaan DIPA sampai dengan akhir tahun. 2. Tidak bertambahnya jumlah SDM yang mengikuti Diklat SAKIP. 3. Satker tidak mendapatkan penghargaan selama tahun anggaran berjalan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) yaitu :

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah merujuk pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung agenda pembangunan pada periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Mendukung wajib belajar 13 tahun
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah
---	---	---	---	--

Arah kebijakan, strategi, dan program Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sulawesi Tengah

Kondisi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
- ❖ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah memenuhi SPM pendidikan

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) terhadap pendekatan dan inovasi dalam pembelajaran dan penilaian, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan, program, dan praktik pembelajaran serta penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Coding, dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI).
- Pembinaan Transfer Daerah untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan program - program pusat di satuan pendidikan dan pemda terkait.

- Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan melaksanakan program-program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melaksanakan supervisi Implementasi Sistem (PMP) dan edukasi penggunaan SNP di Satuan Pendidikan.
 - Pembinaan Kemitraan untuk membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pusat di daerah
 - Pembinaan Digitalisasi Sekolah untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan rumah pendidikan, pengembangan konten pembelajaran dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran, serta memastikan pemanfaatan bantuan digitalisasi dilakukan secara tepat.
 - Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pemantauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
2. Tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut :

- ❖ Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dengan kategori sangat baik
- ❖ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sulawesi Tengah minimal A

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan pemerintah daerah;
- Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BPMP Sulawesi Tengah yang berbasis mekanisme manajemen talenta;
- Melakukan inovasi – inovasi dalam meningkatkan layanan internal dan eksternal BPMP Sulawesi Tengah.

3.3 Kerangka Regulasi

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah

Fungsi

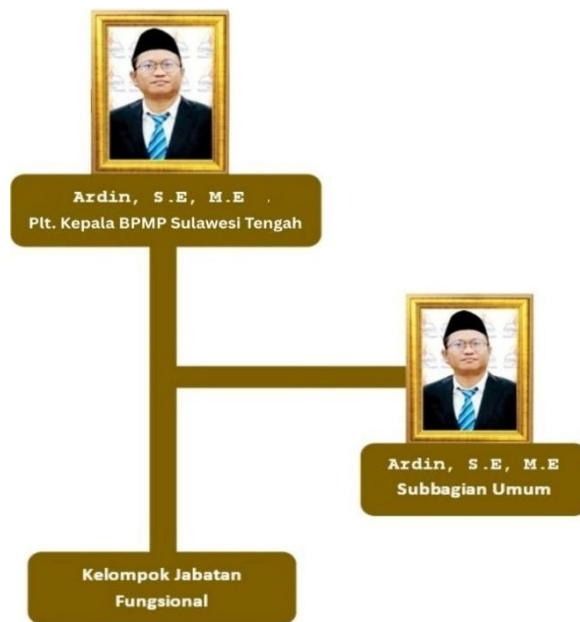
- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan koordinasi penjaminan mutu pendidikan bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi/tata usaha.

3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPMP Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Tengah

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan terkait tugas dan fungsi JF Widyaprada adalah Permenpan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada

Jabatan fungsional yang ada di BPMP Sulawesi Tengah, yaitu JF Widyaprada, JF SDM Aparatur, JF Arsiparis, JF Analis Anggaran, JF Penata Laksana Barang.

Tugas jabatan fungsional secara umum sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai keahlian dan bidang tugas masing-masing;
2. Memberikan dukungan profesional dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
3. Melaksanakan kegiatan advokasi, pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi mutu pendidikan;
4. Mengelola dan menganalisis data mutu pendidikan, termasuk Rapor Pendidikan dan hasil Asesmen Nasional;
5. Menyusun rekomendasi kebijakan atau tindak lanjut peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi;
6. Mendukung pelaksanaan administrasi teknis, perencanaan, dan pelaporan kegiatan BPMP.

3.4.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 3. 2 Aparatur Sipil Negara BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Struktural	43 Orang
2.	Tenaga Fungsional	31 Orang
3.	Tenaga PPPK	21 Orang
4	PPNPN	4 orang
Total		99 Orang

Data per 1 Oktober 2025

3.5. Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2024 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian ini merupakan hasil nyata dari komitmen seluruh jajaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan Berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan beberapa capaian utama sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

BPMP Sulteng menerapkan sistem kerja yang transparan dan akuntabel melalui Penguatan SAKIP, SPIP, dan pelaporan kinerja berbasis data, sehingga seluruh kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka.

2. Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berintegritas

BPMP Sulteng melalui pengembangan layanan digital mutu pendidikan dan mekanisme pelayanan terpadu berbasis daring, BPMP mampu meningkatkan efisiensi waktu layanan dan kepuasan pengguna. Inovasi ini juga memperkuat budaya pelayanan yang cepat, tepat dan tanpa pungutan.

3. Budaya Kerja Berintegritas dan Anti Korupsi melalui pembinaan integritas ASN dilakukan secara berkelanjutan melalui internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, pakta integritas, serta penguatan zona bebas gratifikasi. Pengawasan internal diperkuat dengan sistem Whistleblowing System dan laporan pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

4. Keterlibatan dan Dukungan Seluruh Pegawai

Keberhasilan meraih predikat ZI WBK bukan hasil individu, melainkan buah dari kolaborasi seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, yang bersama-sama membangun budaya kerja bersih, melayani, dan profesional.

5. Dampak terhadap kinerja lembaga

Setelah memperoleh Predikat ZI WBK, BPMP Sulteng menunjukkan peningkatan kinerja signifikan dalam pelayanan penjaminan mutu pendidikan, pengelolaan data, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan

Predikat ZI WBK ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi BPMP Sulteng. Kedepannya BPMP Sulteng berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan integritas menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), sekaligus menjadi model satuan kerja berintegritas di lingkungan UPT Kemendikdasmen di Provinsi Sulawesi Tengah.

BPMP Sulteng sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikdasmen, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 3. 3 (Enam) Area Perubahan

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) b. Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan BPMP Sulteng c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan BPMP Sulteng e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
4.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi c. Assessment Pegawai d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
5.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan BPMP Sulteng b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik	a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan publik c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61

SK.2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Tengah						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sulawesi Tengah minimal A	Predikat	A	A	A	A	AA

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan (Miliar Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan PAUD dan Wajib Belajar 13 Tahun	1.028,08	1.128,08	1.228,08	1.328,08	1.428,08
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang Dikdas, Dikmen dan Dikmas	10.823,92	11.932,92	12.652,92	13.302,92	14.052,92
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	17.486,79	19.832,79	20.332,79	20.532,79	21.032,79

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 - 2029.

Dalam Rencana Strategis diuraikan secara sistematis tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara pada pencapaian visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2025 - 2029. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari klasifikasi rincian output (1) Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya; (2) Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan; (3) Layanan BMN; (4) Layanan Umum; (5) Layanan Perkantoran .

Dengan adanya renstra ini, seluruh kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat terarah dan terencana dalam mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan, tata kelola dan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan serta untuk memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN										23.239.435	40.153.496	58.718.844	60.480.409	62.294.821
Kegiatan	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	UPT							244.433	537.185	553.301	569.900	586.997
SK	SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen												
IKK	IKK	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34					
IKK	IKK	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan		persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61					
KRO	7605.Q DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7605.Q DB.750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya		Lembaga	412647	412647	412647	412647	412647					
RO	7605.Q DB.850	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan		Lembaga		552	552	552	552					
Program	WA	Program Dukungan Manajemen								1.014.380	1.408.216	1.450.463	1.493.977	1.538.796
SP	SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian												
IKP	IKP 5.1.21	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
IKP	IKP	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Predikat	A	A	A	A	AA					

Keterangan	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	5.1.22	Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah												
Kegiatan	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Pusat							1.014.380	1.408.216	1.450.463	1.493.977	1.538.796
SK	SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen												
IKK	IKK	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	95	95,5	96	96,5	97					
IKK	IKK	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	97,02	97,03	97,04	97,04	97,05					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	Regulasi ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan. - mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. - menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. 	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2027-2028
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen 2. Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik Bab 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 5 Partisipasi Masyarakat Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 7 Pendanaan Bab 8 Ketentuan Penutup 	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial. 2. Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial 3. Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Sekolah Penggerak 4. Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini. 	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deregulasi Permendikbud tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang selama ini berdiri masing-masing berdasarkan jalurnya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal b. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah c. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyesuaian dengan perkembangan hukum terkait kewenangan perizinan satuan pendidikan di daerah (Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota) berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan. 4. Mendudukan subjek penyelenggara dan memberikan kepastian hukum untuk penyelenggara satuan pendidikan yang dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan (Yayasan, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum). 	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi baru SPK: "Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan, serta menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan berkelas dunia dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia." 2. Kriteria SPK dengan visi baru: <ol style="list-style-type: none"> a. SPK merujuk pada seluruh standar pendidikan asing (whole school transformation) b. SPK memiliki akreditasi internasional dari lembaga yang telah diakui c. Semua SPK memiliki kualitas yang bisa dijadikan rujukan oleh sekolah nasional dan memiliki rencana serta melaksanakan berbagi praktik baik. d. Kementerian menunjuk unit utama internal yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian untuk menetapkan daftar LPA yang ideal sebagai referensi bagi LPI. e. SPK merupakan lembaga yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan remunerasi yang layak kepada guru minimal yang setara antara pendidik atau tenaga kependidikan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah, termasuk TPG, BOS, insentif, dan sebagainya). 	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Tahun 2026 - 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah 	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan profil pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. 2. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah; 	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	<p>Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artificial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua. 2. Mengubah mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) menjadi Mata Pelajaran Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri saat pertemuan dengan Direktur SMK pada tanggal 20 Januari 2025, juga pertemuan terbatas antara BSKAP dengan Menteri. Mata pelajaran PKK diubah menjadi mata pelajaran KIK bertujuan agar lulusan SMK juga memiliki kemampuan berinovasi, menghasilkan produk/jasa kebaruan yang dibutuhkan masyarakat. Mata pelajaran KIK dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha. 	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dan Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kursus merupakan Satuan Pendidikan sekaligus Program yang berskala nasional seharusnya memiliki aturan yang memuat acuan dasar yang mengatur penyelenggaraannya untuk menjamin mutu lulusan kursus dan pelatihan. 2. Ruang Lingkup Pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan (bentuk lembaga, syarat umum perizinan) b. Acuan standar c. Kemitraan dengan daerah 	Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2028 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter Pada Satuan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat 2. Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan. 3. Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter. 4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut. (Permendikbud 23/2015 dan Permendikbud 20/2018). 5. Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan. 	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025

Lampiran 3:

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) satuan kerja Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen (BBPMP/BPMP):

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Definisi	:	<p>Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan dievaluasi mutunya secara berkala melalui asesmen. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran kompetensi kognitif: literasi numerasi, kompetensi sosial emosional berupa profil pelajar Pancasila, serta kualitas lingkungan belajarnya. Data capaian kompetensi tersebut akan menjadi basis penyusunan profil dan rapor satuan Pendidikan.</p> <p>Pengukuran kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk informasi refleksi diri namun juga dapat memetakan kualitas antar satuan pendidikan, kualitas antar kab/kota, antar provinsi dan nasional. Agar perbandingan tersebut dapat dilakukan secara optimal tanpa bias, maka pengukuran kompetensi dilakukan secara terstandar. Standardisasi tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen terstandar, system delivery terstandar dan pelaksanaan yang mengacu pada suatu standar operasional prosedur.</p> <p>Program Kemendikbudristek untuk melakukan pengukuran terstandar adalah Asesmen Nasional.</p> <p>Asesmen Nasional terdiri dari penilaian Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi), Survei Karakter, dan Survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional (AN) bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan bukan mengevaluasi hasil belajar individu murid. Oleh karena itu AN diikuti oleh seluruh satuan Pendidikan jenjang dasar menengah baik pendidikan formal maupun non formal. Responden AN adalah sampel murid kelas 5, 8 dan 11, seluruh kepala satuan Pendidikan dan seluruh guru. Hasil AN tersebut dapat menggambarkan kompetensi kognitif murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas satuan Pendidikan. Diharapkan sekolah dapat</p>

		melakukan perencanaan berbasis data untuk evaluasi diri dari waktu ke waktu.
Metode Penghitungan	:	$\frac{\text{(Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran)}}{\text{(Jumlah seluruh satuan pendidikan)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	AN, Rapor Pendidikan
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Pusdatin, BSKAP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan.
Definisi	:	<p>SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. (Permendikbud No. 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan)</p> <p>tinggi > rendah [2023 ⇔ 2024]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntas Paripurna 100 2. Tuntas Utama 90-99 3. Tuntas Madya 80-89 [0,36% ⇔ 13,41%] 4. Tuntas Pratama 70-79 [11,41% ⇔ 29,35%] 5. Tuntas Muda 60-69 [27,54% ⇔ 39,13%] 6. Belum Tuntas <60 [59,60% ⇔ 18,12%] <p>perhitungan : hanya level pratama dan madya</p> <p>Formula Indeks Capaian SPM: Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima Layanan (80%)</p> <p>Nilai capaian SPM diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima</p>
Metode Penghitungan	:	$\frac{\text{(Provinsi/Kab/kota yang memenuhi SPM pendidikan)}}{\text{(Jumlah seluruh provinsi/kab/kota)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir

Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	AN, Rapor Pendidikan
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Pusdatin, BSKAP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan